

**Opini DENNY J.A.
Koran TEMPO**

**MANUVER
ELIT, KONFLIK DAN
KONSERVATISME
POLITIK**

**Editor :
Fransiskus Surdiasis**

Opini Denny J.A

Koran Tempo

Manuver Elit, Konflik dan Konservatisme Politik

Denny J.A.

xii + 120 halaman: 14,5 x 21 cm

1. Ilmu Politik
2. ISBN : 979-25-5231-6

Editor : Fransiskus Surdiasis

Rancang Sampul : Imam Syahirul Alim

Setting/layout : Santo

Penerbit

LKIS Yogyakarta

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Tlp. (0274) 387194 / 7472110

Faks. (0274) 417762

Cetakan I : Agustus 2004

*Untuk Tiga Matahari :
Mulia Jayaputri Istriku,
Rafi dan Ramy Anakku*

DENNY J.A

Pengantar

JIKA reformasi diibaratkan dengan sebuah buku, Tahun 2002 boleh disebut sebagai awal Bab Kedua, atau ibarat sebuah pertandingan, ia adalah babak keduanya. Pemerintahan Habibie dianggap sekadar sebuah kata pengantar bagi buku bernama reformasi. Bab pertamanya ialah periode singkat pemerintahan Gus Dur yang kemudian berakhir pada pertengahan 2001.

Naiknya Megawati yang menggantikan Gus Dur menandai periode babak Kedua. Bagi periode kepemimpinan Megawati sendiri, separuh tahun 2001 lebih merupakan masa bulan madu. Baru memasuki tahun 2002-lah permulaan babak kedua reformasi sesungguhnya dimulai.

Pada tahun ini, proyek reformasi Indonesia menghadapi beberapa tantangan sekaligus. Pertama dari medan politik. Setelah periode politik gonjang-ganjing reda sementara paska naiknya Megawati, di tahun 2002, arena politik kembali diramaikan oleh Buloggate part II yang melibatkan Akbar Tandjung dan Golkar.

Kedua, tantangan juga datang dari kinerja pemerintahan sendiri yang berpusat pada Megawati selaku presiden. Selaku pusat gravitasi politik, Megawati ternyata belum sanggup mengkonsolidasikan kekuatan politik utama untuk berdiri di belakangnya. Tahun ini masih ditandai oleh berkembangnya tuntutan agar Megawati mengundurkan diri dan kepemimpinan nasional diambilalih oleh sebuah Presidium Nasional.

Ketiga, tantangan dari medan ekonomi. Situasi ekonomi Indonesia tahun 2002 tidak mengalami perbaikan yang berarti. Di awal tahun, pemerintahan menghadapi masalah pengangguran yang mencapai 10 juta lebih. Pemerintah juga memasuki tahun 2002 ini dengan mewarisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan dikisaran 4%.

Keempat, tantangan juga datang dari lapangan keamanan. Selain masih berlanjutnya konflik di Ambon dan Aceh, pada tahun ini, pemerintah dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat dari sepak terjang terorisme. Pada bulan Oktober 2002 itu, sebuah bom dahsyat hasil karya sekelompok teroris anak negeri sendiri merenggut ratusan nyawa di Bali. Tragedi Bali ini merupakan aksi teroris terbesar setelah karya monumental 11 September 2001 di Amerika Serikat. Peristiwa ini makin menyedot energi bangsa Indonesia yang sesungguhnya masih berurusan dengan krisis yang tak kunjung berakhir.

Demikianlah tantangan-tantangan ini jalin-mejalin satu sama lain dan mempengaruhi jalannya roda reformasi Indonesia.

Artikel-artikel yang disatukan dalam Buku ini merupakan respons, rekaman, dan untuk sebagian merupakan sumbangsaran dari penulisnya terhadap sebagian tantangan yang dihadapi di tahun pertama babak kedua reformasi tersebut. Buku ini adalah kumpulan artikel yang membahas sebagian dari tantangan reformasi Indonesia di babak kedua itu, yang secara khusus dimuat setiap hari Selasa di Koran Tempo.

Masalah seputar pemerintahan Megawati dengan seluruh dinamika politik yang melingkupinya; bangkitnya terorisme sebagai senjata politik dan ideologis dengan seluruh resonansi yang dihadirkan beserta konflik; serta perjalanan reformasi yang memasuki tahun keempat yang justru menghadirkan tanda-tanda menguatnya konservatisme politik, merupakan tema utama yang disorot penulis dalam artikel-artikel yang dikumpulkan dalam buku ini. Karena buku ini diberi judul: Manuver Elite, Konflik dan Konservatisme Politik.

Ada 25 artikel dikumpulkan dalam buku ini. Untuk memudahkan pembaca, artikel-artikel tersebut diorganisasikan berdasarkan dimensi tantangan yang dihadapi proyek reformasi Indonesia tahun 2002 itu.

Bagian Pertama merupakan tempat bagi artikel-artikel yang secara khusus menyoroti segi pemerintahan Megawati. Artikel-artikel ini berbicara soal kemampuan komunikasi politik Megawati hingga keberadaan orang-orang dekatnya.

Bagian Kedua merupakan tampungan untuk artikel-artikel yang membahas beberapa segi yang berkaitan langsung dengan reformasi politik. Dari soal konstitusi baru yang menjadi peletakkan arah kehidupan berbangsa, hingga masalah korupsi.

Bagian Ketiga membahas dinamika politik dan aktor politik, mulai dari kasus Bulog, Akbar Tandjung hingga Gus Dur.

Bagian Keempat merupakan tempat bagi artikel-artikel yang secara khusus mengulas tema keamanan, mulai dari konflik hingga masalah terorisme dengan seluruh komplikasi dan warnanya.

Pembagian-pembagian ini pada dasarnya sekadar membantu pembaca untuk menikmati tulisan-tulisan ini sambil menangkap benang merah yang ada pada setiap tema. Namun pada dasarnya, tulisan-tulisan ini bisa dinikmati secara terpisah.

Akhirnya selamat membaca, semoga buku kecil ini berguna paling tidak sebagai rekaman sebagian jejak kolektif kita sebagai bangsa dalam proyek reformasi Indonesia.

Jakarta, Agustus 2006

Fransiskus Surdiasis

Editor

Daftar Isi

Pengantar ... vii

Daftar Isi ... xi

Daftar Buku Denny J.A ... xiii

Bagian Pertama **Seputar Megawati**

- Politik 2002 Kesulitan Permanen Megawati ... 3
- Para Pembisik Megawati? ... 7
- Kontroversi Taufiq Kiemas ... 11
- Ilusi Presidium Nasional? ... 15
- Wiranto, Eros, Adi, dan Fuad ... 20

Bagian Kedua **Seputar Reformasi**

- Kompromi Soal Konstitusi? ... 27
- Terganjalnya Politik Reformasi ... 32
- Larangan Pejabat Berkampanye ... 36
- Selamat Datang Konstitusi Baru ... 40
- Atas Nama Islam ... 44
- Kini Mereka Saling Menembak ... 48
- Upaya Terakhir Melawan Korupsi? ... 53
- Setelah Kasus Tempo Versus Tommy ... 58

Bagian Ketiga **Seputar Partai dan Aktor Politik**

- Golkar Setelah Buloggate II ... 65
- Pengadilan Politik Akbar Tandjung? ... 69
- Rapuhnya Aliansi Partai ... 74
- Tragedi Politik Gus Dur ... 78
- Calon Presiden dan Wapres 2004 ... 82
- Dilema Partai Golkar? ... 86

Bagian Keempat **Seputar Konflik dan Terorisme**

- Rekayasa Konflik di Ambon? ... 93
- Laskar Jihad, FPI dan Muhajidin ... 97
- Pengadilan Buat Ba'asyir ... 102
- Politik Fantasi Para Teroris ... 107
- Hadiah Nobel untuk Aceh? ... 112

Sumber Naskah ... 116

Bagian Pertama
Seputar Megawati

Politik 2002

Kesulitan Permanen Megawati

TAHUN 2001 merupakan periode warming up atau pemanasan bagi Presiden Megawati. Ia memang baru menjabat sebagai presiden di pertengahan 2001, tidak dari awal tahun. Lima bulan di paruh akhir 2001 dapat dikatakan masa adaptasi politik dan bulan madu Megawati sebagai presiden. Segala kekurangan dan kelemahan di masa adaptasi itu lebih mudah dimaafkan publik.

Namun pada 2002, tuntutan publik kepada Megawati sudah berbeda. Ia dianggap dan diharap sudah melewati masa warming up. Ketegasan visi dan inisiatifnya selaku pemimpin di era krisis ditunggu. Indonesia pada tahun 2002 menghadapi gejala ekonomi dan politik yang sama parahnya dengan 2001. Bahkan banyak pakar yang memperkirakan kondisi politik dan ekonomi kita justru bertambah parah pada 2002.

Tahun ini, jumlah penganggur sudah mencapai sekitar 45 juta. Ini sama dengan 25 persen dari angkatan kerja kita.

Presentase ini lebih besar dari kasus Argentina yang kini sedang dilanda amuk massa. Inflasi diperkirakan meninggi sejalan dengan dikurangnya subsidi BBM dan listrik. Bunga SBI tetap tinggi. Bertambahnya bunga SBI sebesar 1 persen akan mengakibatkan tambahan defisit APBN sebesar sekitar Rp.2 triliun. Rupiah terus merosot. Turunnya rupiah terhadap dollar sebesar seribu rupiah akan menambah defisit APBN sekitar Rp.9 triliun. Anggaran untuk membayar utang lebih besar dari anggaran pembangunan.

Dunia politik tidak kalah gonjang-ganjing. Belum selesai kasus Bulog II yang melibatkan Akbar Tandjung, sudah muncul kontroversi abolisi Soeharto. Belum selesai kasus Tommy Soeharto, Megawati diminta pula bersikap atas kasus perpecahan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara pergolakan daerah – mulai dari Aceh, Papua, Poso, Sampit dan Singkawang – masih terus mendidih.

Indonesia memang masih berada dalam kondisi krisis pada 2002. Kondisi krisis mengharapakan tampilnya pimpinan nasional yang juga mengembangkan leadership yang dibutuhkan di era krisis. Namun justru di sini letak kelemahan permanen Presiden Megawati. Kelemahan komunikasi politik dan fragmentasi kabinetnya menjadi kendala serius Megawati menghadap kerasnya politik dan ekonomi 2002.

Megawati dapat belajar dari Presiden AS George W. Bush. Sebagai mana Indonesia, AS juga mengalami shock secara nasional. Tragedi 11 September 2001 bukan saja sudah merontokkan simbol ekonomi dan militer AS. Pusat bisnis World Trade Centre rata dengan tanah. Pusat militer Pentagon hancur berantakan. AS diserang di kandang sendiri. Rasa aman dan kepercayaan diri masyarakat AS juga turut lumer bersamaan dengan hancurnya gedung WTC dan Pentagon.

Namun, Presiden George Bush tampil sebagaimana yang diharapkan dari seorang pemimpin nasional di era krisis. Ia

berulang-ulang berpidato, baik di televisi ataupun di depan warga negara secara langsung. Ia bangkitkan kembali harapan masyarakatnya yang sedang rapuh. Ia berikan kembali arah dan langkah apa yang akan dikerjakan pemerintahannya di tengah masyarakat yang tengah mengalami disorientasi.

“Para teroris”, ujar Presiden Bush, “memang berhasil menghancurkan gedung tertinggi di Amerika Serikat. Namun, mereka tidak pernah berhasil menghancurkan fundamen masyarakat kita, yaitu kebebasan. Kita akan terus melindungi kebebasan masyarakat kita dengan cara menggempur para teroris itu di seluruh dunia. Mereka yang telah membunuh saudara-saudara kita akan mendapatkan balasan yang setimpal.”

Karena terus menerus diberi semangat oleh presidennya dan adanya tim solid yang bekerja di belakang presiden, masyarakat Amerika Serikat kembali tegak dan bertekad berdiri di belakang presiden. Konsistensi dan kejelasan tekad Presiden Bush mendapat dukungan yang tidak alang kepalang dari Konggres untuk memerangi terorisme. Di dunia internasional, Bush juga mendapatkan dukungan yang luar biasa, tidak hanya dari para sekutunya. Negara yang berpenduduk Islam pun, seperti Pakistan dan Nigeria, mendukungnya secara penuh.

Empat bulan setelah 11 September, popularitas Bush di dalam negeri naik. Ia dipuji tidak hanya oleh pendukungnya, tetapi juga oleh barisan yang dulu menjadi lawan politiknya. Bush telah melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin di era krisis, yaitu mengambil inisiatif dan risiko, memberikan visi dan harapan, serta memobilisasi dukungan domestik ataupun internasional untuk mencapai misi itu.

Kesigapan pemimpin seperti Bush itu, sayangnya, tidak ada pada Megawati. Komunikasi Presiden Megawati dengan publik tidak terlalu baik. Padahal publik di Indonesia sedang mengalami disorientasi, kehilangan harapan, dan butuh penguatan. Banyak

pula pesan politik Megawati yang terkesan ambigu, atau bahkan tidak dikerjakan oleh bawahannya, bahkan oleh Presiden Megawati sendiri.

Di satu sisi, Megawati menyatakan perlunya komisi konstitusi dalam pidato kenegaraan resmi. Namun ia diam saja ketika komisi konstitusi tidak diperjuangkan oleh partainya sendiri di MPR. Di satu sisi, ia menyatakan perang terhadap KKN. Namun tidak terdengar adanya kasus korupsi besar yang dibongkar. Bahkan berkembang wacana abolisi terhadap Soeharto, yang dianggap pusat dari politik korupsi. Di satu sisi, Megawati menyatakan perlunya hidup sederhana. Namun, rombongan yang dibawanya ke luar negeri sangat besar. Diberitakan pula, sebelum ke Cina, Megawati mampir ke Hong Kong, lalu bersama rombongan belanja selayaknya rombongan turis.

Megawati juga membawahi kabinet yang terfragmentasi. Yang menjadi timnya, mulai dari wapres dan beberapa menteri, bukan saja tokoh partai lain, tetapi mereka bahkan potensial pesaing Megawati sendiri untuk menjadi presiden pada 2004. Tokoh partai lain itu wajar saja jika juga bersikap ambigu terhadap Megawati. Di satu sisi, mereka ingin Indonesia menjadi lebih baik dengan cara membantu Megawati. Namun di sisi lain, mereka ingin agar Megawati tidak lagi menjadi presiden untuk membuka kesempatan bagi dirinya mejadi presiden. Bagi mereka, Megawati tidak boleh terlalu sukses, agar tidak lagi terpilih sebagai presiden 2004.

Hal-hal di atas memang pahit buat Presiden Megawati dan timnya. Namun karena kecintaan kepada beliau dan masa depan Indonesia, hal itu harus dikatakan. Jika tidak, kendala permanen Megawati itu akan semakin menyulitkannya untuk bertahan pada 2002.

Para Pembisik Megawati?

DI Amerika Serikat, presiden disebut juga sebagai gentleman number one. Pemangku jabatan presiden secara otomatis menjadi orang yang paling berpengaruh. Kebijakannya, baik melalui perbuatan ataupun pernyataan publik dengan mudah menjadi wacana yang berskala nasional, dan mampu membulat lonjongkan seluruh negeri. Dengan menjadi presiden, ia pun akan didatangi oleh individu atau kelompok yang ingin menjadi pembisik. Motif para pembisik itu beragam mulai dari ingin menyelamatkan presiden sampai dengan ingin menyelamatkan kepentingan si pembisik itu sendiri.

Justru karena besarnya pengaruh presiden dan banyaknya para pembisik, sejak awal lembaga presiden memiliki filter dan mekanisme seleksi. Melalui filter itu, presiden dilindungi dari kemungkinan mendapatkan input yang salah, terlebih lagi diproteksi dari kemungkinan membuat kebijakan dan pernyataan yang keliru.

Di Indonesia, presiden lebih berkuasa, karena juga menjadi ketua umum partai terbesar. Efek tindakan dan pernyataannya kepada publik luas lebih merasuk. Para pembisik yang datang juga pasti lebih beragam. Sudahkah lembaga presiden dan ketua umum partai terbesar di Indonesia ini dilindungi oleh mekanisme filter?

Pernyataan ini muncul seketika setelah membaca gunjangan-jang para pembisik di sekitar Megawati. Majalah Tempo yang terbit Senin ini (edisi 15 Juli 2002) bahkan menjadikan kisah pembisik Megawati itu sebagai laporan utama. Latar belakang mencuatnya isu para pembisik Megawati adalah kekecewaan publik atas beberapa kebijakan yang lahir dari Megawati sendiri, mulai dari isu Sutiyoso, Pansus Bulogate 2, sampai amandemen UUD 45.

Publik dengan cepat menduga pasti ada pembisik yang memberikan input yang salah dan Megawati tidak memiliki filter untuk menyeleksi informasi dari para pembisiknya. Laporan Utama Majalah Tempo dengan segera menjadi hukuman bagi para pembisik, walau mungkin Majalah Tempo tidak bermaksud demikian.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menjadi pembisik presiden. Di alam demokrasi yang bebas, semua pihak bebas pula untuk mempengaruhi pengambil kebijakan, apalagi presiden. Membisiki presiden bukan tindakan kriminal, bahkan merupakan aksi politik tingkat tinggi, yang akan dilakukan hampir oleh semua politisi jika mempunyai kesempatan.

Yang salah adalah jika tidak adanya filter dan mekanisme bagi presiden dan ketua umum partai. Tanpa filter itu, presiden, sekaligus ketua umum partai, sulit membedakan bisikan mana yang memang berguna bagi orang banyak dan yang mana yang justru dapat menjerumuskan tidak hanya dirinya, tetapi juga bangsa secara keseluruhan.

Di dunia maju, seorang presiden, apalagi jika ia merangkap ketua umum partai, akan difasilitasi oleh tiga jenis filter. Mekanisme filter pertama adalah platform partai sang presiden sendiri. Presiden, di negara demokrasi yang maju, menjadi pemimpin untuk sebuah platform. Semua kebijakan dan pernyataannya dibuat sebisa mungkin konsisten dengan platform itu. Berapa banyak pun pembisik yang datang, sejauh input yang diberikan masih dalam kerangka platform akan tidak menjadi masalah. Seandainya ada bisikan yang mengajak presiden menentang platform partainya sendiri, bisikan maut itu akan terpental dengan sendirinya.

Partai Republik di Amerika Serikat, misalnya, memang punya platform yang pro kepada pasar bebas dan penurunan pajak. Presiden yang datang dari Partai Republik sebisa mungkin terus membuat pajak semakin kecil, sehingga para pengusaha lebih dapat mengakumulasi laba bagi investasi selanjutnya. Jika ada para pembisik yang menganjurkan presiden menaikkan pajak, para pembisik itu langsung menjadi “musuh politik” presiden.

Partai Demokrat, juga di Amerika Serikat misalnya, punya platform partai yang pro kepada multi kulturalisme dan feminisme. Presiden yang datang dari partai ini banyak didukung kaum feminis. Memang menjadi platform partai ini, dan juga presidennya, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk secara bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Para pembisik dapat saja menganjurkan banyak hal kepada presiden. Namun sulit bagi pembisik itu mempengaruhi presiden untuk anti aborsi, misalnya, yang akan ditentang oleh kaum feminis. Platform partai sejak awal sudah menyeleksi warna dari bisikan sang pembisik.

Kita andaikan saja para pembisik itu begitu canggihnya sehingga mampu menembus filter yang pertama ini dengan berhasil membuat presiden lupa kepada platform partai. Namun presiden, apalagi ketua umum partai, juga punya lapisan filter

kedua, yaitu brain trust presiden. Mereka adalah kelompok profesional kepercayaan presiden. Mereka berada dalam satu tim, yang masing-masing ahli di bidang utama, seperti politik, ekonomi, dan hukum. Di samping ahli, integritas mereka juga dipercaya presiden dan ketua umum partai.

Di negara maju, presiden tidak pernah membuat pernyataan atau kebijakan secara spontan. Tim brain trust itu mengolah dulu aneka pernyataan dan kebijakan yang akan dilahirkan presiden. Para pembisik yang dapat mencelakakan presiden sudah tersaring lebih dahulu di level brain trust ini. Seberapa sering bisikan dan seberapa banyak para pembisik menjadi tidak berbahaya karena ada filter dari brain trust.

Katakanlah seandainya lapis filter kedua ini juga dapat jebol oleh keahlian sang pembisik, tetap ada lapisan filter ketiga yang merupakan pengawal terakhir presiden. Filter ketiga itu adalah core philosophy dari sang presiden sendiri. Di negara maju, dimana kompetisi dan debat publik begitu ketat, mustahil seseorang dapat menjadi presiden jika ia tidak memiliki core philosophy.

Seorang presiden tidak perlu menguasai semua masalah penting secara detail. Presiden bukan super akademisi, superman, atau wonder woman. Cukup bagi presiden, jika ia mempunyai visi dan pandangan umum. Ia punya preferensi tentang politik, ekonomi dan hukum. Ia juga punya preferensi tentang isu yang penting, seperti amandemen konstitusi, sistem pemilu. Core philosophy ini yang menjadi filter terakhir presiden dan ketua umum jika sang pembisik bisa lolos dari filter pertama dan kedua.

Mereka yang mencintai presiden dan ketua umum PDIP sudah harus mengembangkan tiga jenis filter itu. Dengan seleksi tiga jenis filter itu, berapapun banyaknya pembisik di sekitar Megawati tidak akan menjadi masalah.

Kontroversi Taufiq Kiemas

DI negara maju, tokoh politik yang berpengaruh dikawal oleh sebuah tim profesional. Tim ini membantu sang tokoh bukan hanya untuk membaca situasi yang kompleks. Tim juga menemani sang tokoh merumuskan kebijakan untuk merespon situasi. Dengan bantuan tim, sang tokoh terlindungi semaksimal mungkin dari kesalahan. Bahkan tim itu membantu sang tokoh untuk membuat berita yang menambah tingkat popularitas dan pengaruh, di samping membuatnya lebih visioner dan berkomitmen.

Tim juga membantu publik untuk memahami pesan utama atau platform politik sang tokoh. Derajat kesalah-pahaman atas tindak tanduk sang tokoh itu dikurangi sekecil mungkin. Di dunia yang semakin kompleks dan kompetisi politik yang keras, tim profesional itu menjadi instrumen yang amat dibutuhkan.

Namun di Indonesia, belum ada kultur politik yang memperkerjakan tim profesional itu. Akibatnya, sang tokoh

politik berpengaruh acapkali terjebak dalam serangan opini publik. Inilah yang terjadi pada Taufiq Kiemas di sela-sela Sidang Tahunan MPR.

Publik mendapatkan fakta bahwa ia turut menanda-tangani sebuah petisi yang kini disebut pers sebagai “petisi anti amandemen kebablasan”. Tidak ada keterangan yang memadai dari pihaknya mengapa ia menanda-tangani petisi itu. Tidak ada pula penjelasan yang memuaskan apakah ia memang ingin mempertahankan UUD 45 yang “murni dan konsekuen”.

Yang didapati publik hanyalah konfirmasi dari aneka politisi lain, yang merasa terbantu oleh tanda tangan Taufiq Kiemas. Lebih parah lagi konfirmasi itu tidak pula diartikulasikan dalam bahasa argumen yang masuk “common sense”. Maka untuk pertama kali dalam karir politiknya, oleh opini publik, Taufiq Kiemas dicap sebagai kekuatan anti reformasi.

Tanpa klarifikasi politik yang memadai dari pihaknya, label “anti reformasi” dengan cepat akan meruntuhkan semua prestasi politiknya di mata publik. Padahal sejak reformasi, secara gradual Taufiq Kiemas menjadi ikon penting dalam politik praktis. Secara formal ia tidak menduduki posisi politik di dunia kepartaian ataupun pemerintahan. Namun publik sudah menganggapnya sebagai “Godfather” yang berada di balik aneka manuver politik yang akhirnya mengantarkan Megawati menjadi presiden Indonesia.

Bagi kalangan elit politik, Taufiq Kiemas sudah tumbuh menjadi patron yang berwibawa di PDIP, partai terbesar dan pemenang pemilu. Ia menjadi semacam pintu masuk untuk mempengaruhi suara partai. Bahkan kini publik memahami bahwa kekuatan politik Taufiq Kiemas sudah berkembang ke berbagai jaringan, tidak hanya dunia kepartaian, tetapi juga dunia usaha, militer, ormas besar dan aneka perkumpulan politik.

Bisa jadi, konflik mengenai amandemen konstitusi menjadi kasus pertama yang meletakkan Taufiq Kiemas berhadapan dengan kekuatan reformasi. Bahkan Mohtar Pabotinggi, seorang intelektual berwibawa, dengan lantang berkata kepada pers bahwa Taufiq Kiemas adalah kekuatan anti demokrasi.

Label ini mungkin secara terus terang menggambarkan platform politik Taufiq Kiemas. Tetapi bisa jadi, label itu salah alamat dan tidak fair diberikan kepada Taufiq Kiemas. Benar atau tidak benar, fair atau tidak fair label itu, sangat tergantung dari apa yang sebenarnya menjadi alasan dan target Taufiq Kiemas menentang penuntasan amandemen, yang oleh Amien Arjoso dianggap kebablasan itu.

Ada alasan penentangan amandemen yang masih diterima sebagai variasi demokrasi. Namun ada pula alasan penentangan yang dengan mudah diklaim sebagai ideologi status quo dan otoritarian.

Hal yang sah saja, bahkan pro reformasi jika Taufiq Kiemas, misalnya, menentang amandemen atas pasal 29. Masuknya syariat Islam (Piagam Jakarta) ke dalam konstitusi akan merubah negara Pancasila menjadi negara agama. Jelas agama adalah hal yang sangat penting, namun itu urusan masyarakat, bukan urusan negara. Apalagi sejarah menunjukkan bahwa kebebasan agama yang plural justru terjadi di negara sekuler, bukan di negara agama.

Hal yang sah pula, jika Taufiq Kiemas, misalnya, tidak menyetujui pemilihan presiden secara langsung dalam konteks multi partai. Situasi ini dapat membuat konflik kelembagaan yang rumit antara presiden versus DPR. Dua lembaga ini menjadi sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Namun dalam konteks multi partai, sangat mungkin dua lembaga ini didominasi oleh partai yang berbeda bahkan bertentangan. Akibatnya presiden dan DPR sulit bekerja sama dan menjerumuskan negara dalam deadlock dan immobilism.

Pandangan yang menolak pemilihan presiden langsung dalam konteks multi partai juga dianut oleh aneka akademisi internasional terkemuka seperti Scott Mainwaring dan Juan Linz. Dua pakar ini bahkan mempunyai data dengan melihat sejarah transisi di berbagai negara.

Hal yang sah pula jika penolakan amandemen Taufiq Kiemas, misalnya, karena ia menginginkan Komisi Konstitusi untuk ikut terlibat dalam proses amandemen. Komisi Konstitusi dapat lebih menjamin sebuah metodologi amandemen yang lebih solid dan koheren. Jika pandangan anti amandemen jenis ini yang Taufiq anut, tidak dapat pula ia dilabeli anti reformasi. Hampir semua intelektual dan LSM pro reformasi juga mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya Komisi Konstitusi.

Namun jika penolakan Taufiq Kiemas itu berujung pada keinginan mengembalikan UUD 45 secara murni dan konsekuen, jelas ini tidak dapat diterima oleh semangat reformasi. UUD 45 pada dirinya adalah konstitusi otoritarian yang dengan mudah digunakan penguasa untuk konsolidasi otoritarianisme. Dalam UUD 45 yang asli, misalnya, presiden dapat terus dipilih sampai kapanpun. MPR pun menjadi lembaga tertinggi yang tidak dapat dikontrol oleh lembaga lain. Ini ideologi para nasionalis garis keras yang sudah tidak lagi sesuai dengan semangat zaman.

Saatnya Taufiq Kiemas melakukan klarifikasi apa yang menjadi alasan dan target dari ikut tanda tangan “petisi menolak amandemen kebablasan” itu. Figur Taufiq Kiemas terlalu penting untuk dijadikan tameng bagi gerakan para nasionalis garis keras. Gerakan itu tidak hanya akan merugikan citra Taufiq Kiemas pribadi, namun juga masa depan reformasi yang memang berbeda dengan cita-cita para nasionalis garis keras.

Kasus Taufiq Kiemas sekali lagi menggarisbawahi pentingnya tim profesional untuk ikut mengawal seorang tokoh yang berpengaruh. Tim profesional ini dapat membantunya

menjadi negarawan yang tidak hanya mencerdaskan partainya, tetapi juga bangsa. Taufiq Kiemas harus kembali menjadi simbol reformasi dan mengendalikan nasionalis garis keras di partainya sendiri. Hanya dengan cara itu ia akan menjadi legenda dan dicatat sejarah dengan tinta emas.

Ilusi Presidium Nasional?

SEBUAH terminologi politik baru kini sedang populer diperbincang para demonstran: presidium nasional. Mereka membayangkan pemerintahan Megawati dan Hamzah Haz akan jatuh di tahun 2003 ini. Presidium nasional akan menggantikan pemerintahan sampai terlaksananya sebuah pemilu baru.

Siapa yang akan duduk dalam presidium nasional itu? Belum ada kesepakatan di kalangan penganjurnya sendiri. Bagaimana pembagian kerja di antara anggota presidium guna menghindari keretakan lembaga itu sendiri? Juga belum ada konsepnya. Apakah presidium nasional itu akan diterima secara luas? Ini pun belum dielaborasi. Diandaikan saja bahwa negara perlu diselamatkan. Dan penyelamat yang paling mungkin adalah presidium nasional.

Dari sisi psikologi politik, ide presidium nasional adalah puncak protes atas semua tokoh formal dan sistem politik yang kini berlaku. Para demonstran tidak lagi mempercayai

perubahan yang bersandar kepada prosedur sebagaimana yang digariskan konstitusi. Revolusi, jalan pintas dan solusi cepat menjadi alternatif. Ilusi akhirnya dijadikan ideologi.

Sebagian kaum demonstran, serta politisi dan intelektual dibelakangnya, tidak lagi mempercayai sosok Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebagian mereka mungkin pernah berharap banyak atas Megawati, terutama ketika Megawati berada dalam represi politik Soeharto. Namun ketika berkuasa, mereka melihat tidak banyak pula yang dapat dilakukan Megawati. Bahkan Megawati tidak kunjung tampil sebagai presiden modern, yang sering berkomunikasi dengan rakyatnya sendiri.

Empat tahun setelah reformasi, mereka melihat korupsi justru semakin luas. DPR yang dipilih secara demokratis, justru terlibat dalam aneka praktek korupsi. Bagaimana pemberantasan korupsi dapat terlaksana secara radikal jika para pemimpin partai sendiri tidak kuasa dengan jaringan korupsi itu.

Wong cilik, rakyat banyak, segmen masyarakat yang paling menderita, mereka anggap juga tetap menderita di bawah pemerintahan Megawati. Jumlah pengangguran sudah melampaui angka empat puluh juta jiwa. Sementara berita perusahaan asing yang tutup dan hengkang ke luar negeri terdengar semakin sering. Dalam situasi seperti ini, kenaikan harga BBM, listrik dan telepon diterjemahkan mereka sebagai ketidakpedulian pemerintah atas penderitaan orang banyak.

Para demonstran tentu bukan ekonom. Mereka tidak akan tekun mendengar penjelasan teknis ekonomi dari para teknokrat ataupun intelektual yang menyetujui pengurangan subsidi. Mereka hanya bergerak dengan common sense saja. Yang mereka pahami, rakyat banyak semakin menderita. Sementara konglomerat hitam yang telah menghisap uang negara trilyunan rupiah justru dibebaskan.

Para demonstran yang memunculkan isu presidium nasional marah atas situasi. Mereka menginginkan Megawati jatuh dari kekuasaannya. Namun mereka tidak ingin kekuasaan itu diambil alih oleh Hamzah Haz. Sesuai dengan konstitusi, jika presiden berhalangan, wakil presiden secara otomatis menjadi presiden.

Bagi mereka, Hamzah Haz berada dalam lingkaran yang sama. Semua ketidakpuasan yang kelompok ini keluhkan, mereka anggap, adalah produk bersama pemerintahan, dimana Hamzah Haz ikut di dalamnya. Apalagi di kalangan demonstran saat ini banyak pula dari kalangan yang bukan berasal dari komunitas Islam. Mereka menginginkan demokrasi yang lebih bercorak kerakyatan, yang lebih populis. Figur Hamzah Haz yang pro kepada Piagam Jakarta sangat tidak cocok dengan skenario Indonesia Baru yang mereka idealkan.

Tidak hanya kepada tokoh, kaum demonstran ini juga tidak percaya kepada sistem besar politik Indonesia. Bagi mereka, sistem ini terbukti membawa kemaslahatan bagi rakyat banyak yang miskin. Itu sebabnya, mereka tidak meminta MPR bertindak untuk memecat presiden. Mereka juga tidak percaya kepada MPR dan seluruh aturan di belakangnya. Yang mereka usung cuma satu dan jalan pintas: Presidium Nasional.

Memang kemarahan para demonstran ini dapat dimengerti. Persoalannya, apakah konsep yang mereka tawarkan itu lebih baik? Dan secara politik, apakah konsep presidium nasional itu dapat diterima oleh banyak kekuatan yang berpengaruh?

Kita bayangkan seandainya konsep Presidium Nasional itu diterima, siapa tokoh utamanya? Dalam revolusi politik untuk karakter Indonesia, tokoh utama itu dapat seorang ulama besar, seperti Khomeini, atau seorang pemimpin militer yang berpengaruh seperti Khadafi. Kondisi kita saat ini tidak mempunyai tokoh itu. Mustahil ada revolusi tanpa pimpinan revolusioner yang populer.

Tokoh agama di Indonesia, yang paling besar, berasal dari NU atau Muhammadiyah. Hasyim Muzadi atau Syafii Maarif mustahil mau memimpin sebuah revolusi. Dua tokoh ini cukup moderat dan menghormati prosedur konstitusi Indonesia. Di luar dua tokoh ini, ada Nurcholish Madjid. Guru bangsa ini juga mustahil bersedia terlibat dalam kudeta. Sementara banyak ulama garis keras yang pasti akan ditolak oleh demonstran sendiri.

Sementara tidak ada pula tokoh militer yang dapat menarik gerbong para serdadu untuk membangkang. Kekuatan militer juga terpecah ke dalam berbagai faksi. Namun ada pakem politik yang membuat mereka setia kepada konstitusi UUD 45. Merekapun sedang dalam proses menuju tentara profesional. Militer aktif yang berpolitik akan terasing. Sementara purnawirawan militer sudah kehilangan basis pendukungnya di kalangan militer sendiri.

Akhirnya yang bersedia memimpin revolusi dan presidim nasional hanyalah politisi kelas dua dan kelas tiga. Mereka bahkan dapat dilecehkan oleh komunitasnya sebagai tokoh yang tidak punya massa. Karena takut menghadapi pemilu dan pasti kalah karena tidak dipilih rakyat, maka mereka memilih ide presidium nasional. Mereka berilusi, konsep ini akan dapat membuatnya mencapai jalan pintas menuju kekuasaan.

Di samping tidak ada calon pemimpin yang kredibel, lembaga presidium itu mudah pula retak. Tidak dapat kita bayangkan apa jadinya jika yang berkuasa di Presidium Nasional terdiri dari begitu banyak orang. Mereka disatukan lebih karena menghadapi musuh bersama. Tetapi apa yang menjadi program detail, dan siapa yang memutuskan pembagian kerja, tidak pernah jelas. Melalui waktu, seandainya pun ide Presidium Nasional itu ada, lembaga ini akan menggali kubur bagi dirinya sendiri.

Sudah pasti Indonesia tidak akan pernah lebih baik dipimpin oleh Presidium Nasional. Dipimpin oleh seorang presiden yang

tunggal saja, Indonesia era reformasi selalu punya persoalan dengan koordinasi. Apalagi jika penguasanya banyak seperti yang tercermin dalam Presidium Nasional.

Last but not the least, konsep presidium nasional pasti tidak didukung oleh para pemimpin partai besar. Sama seperti tokoh yang ingin menjadi anggota presidium, pemimpin partai besar juga ikut berkuasa. Namun bagi mereka, pemilu adalah mekanisme yang paling diakui dunia internasional. Jika ingin kuat kedudukannya, hanya melalui pemilu pemerintahan sekarang dapat digantikan secara sah.

Dengan kata lain, buat apa susah-susah berpikir tentang Presidium Nasional, jika dengan cara yang amat biasa, melalui pemilu, dapat mengantarkan mereka menjadi presiden berikutnya. Ide presidium nasional, sungguhpun terkesan unik dan seksi, akibatnya hanya tinggal ilusi belaka. Sungguhpun ide ini terus dihembus-hembuskan oleh kalangan yang radikal, ia hanya menarik kalangan yang senang dengan ilusi belaka.

Wiranto, Eros, Adi dan Fuad

BAGAIMANAKAH karir politik empat tokoh itu kelak di tahun 2004, ketika pemilu dilangsungkan? Di antara empat tokoh itu, siapa yang paling memetik keuntungan politik dari merebaknya aksi protes saat ini? Pertanyaan ini lahir begitu saja ketika membaca luasnya pemberitaan tentang empat tokoh itu: Wiranto, Eros Djarot, Adi Sasono dan Fuad Bawazier.

Dalam minggu terakhir Januari 2003 ini, hampir semua koran dan majalah menjadikan mereka sebagai berita utama. Jika ada pemilihan the men of the month, mungkin pada bulan Januari 2003, keempat tokoh itu yang terpilih. Mereka serentak menjadi pembicaraan ketika BIN melaporkan bahwa mereka berada di balik aksi protes. Tidak hanya keterlibatan saran dan perspektif, mereka pun diduga memberikan dana.

Sebagian mungkin percaya kepada laporan BIN, sebagian tidak, sebagian mungkin tidak peduli. Demikianlah keberagaman opini terhadap apapun yang datang dari pemerintah. Namun

realitas sosial sudah terkonstruksikan sedemikian rupa akibat luasnya pemberitaan. Benar atau tidak, akurat atau tidak, empat tokoh ini terlanjur sudah terkena label.

Baik jika laporan BIN itu benar ataupun salah, tentu sebagai tokoh kawakan, keempatnya tahu pasti bahwa aksi protes yang sekarang ini terjadi akan redam dan memudar melalui waktu. Presiden Megawati sangat sulit untuk digantikan di tengah jalan. Konstitusi yang sudah diamandemen sepenuhnya melindungi Megawati. Hanya jika melakukan pelanggaran hukum, Megawati dapat diganti. Jika hanya mengambil kebijakan yang tidak populer, konstitusi tidak mengizinkan pencopotan presiden.

Keempat tokoh itu pasti tahu bahwa elit utama partai besar tidak akan pula bersedia berkeringat menurunkan Megawati di tengah jalan. Jika dikudeta di tengah jalan, belum tentu tokoh partai besar yang akan menggantikan. Padahal elit partai itu sudah bersusah payah membangun partai secara kelembagaan untuk merebut pemerintahan secara sah. Mereka bahkan bersedia pasang badan agar Megawati selamat sampai tahun 2004, namun dengan citra yang sudah terpuruk serendah-rendahnya agar dapat mereka kalahkan dalam pemilu mendatang.

Berita yang heboh tentang empat tokoh ini, oleh mereka sendiri, boleh jadi hanya dianggap sebagai pemanasan belaka. Katakanlah ini sebagai medan uji coba untuk melihat reaksi publik. Pertarungan yang sebenarnya, yang akan menentukan karir politik empat tokoh ini selanjutnya adalah pemilu 2004. Akankah mereka terlibat dalam pertarungan itu? Akankah mereka memenangkan pemilu 2004 dan menjadi penguasa baru secara sah, demokratis dan legitimate?

Hampir dapat dipastikan, pada tahun 2004, Adi Sasono akan memimpin sebuah partai. Ia sudah mengundurkan diri dari ICMI. Kecintaannya kepada ICMI membuatnya rela melepaskan

jabatan ketua umum agar ICMI tetap menjadi organisasi non-partisan. Sementara Adi Sasono sendiri berijtihad politik untuk mendirikan memimpin partai baru.

Belum kita ketahui kekuatan partainya. Ketika ia masih menjadi menteri di era Habibie, dengan jaringan dan kekuasaan formal di tangan, ia pernah dicalonkan menjadi presiden oleh PDR. Namun di luar dugaan, PDR menjadi partai yang sangat gurem.

Kegagalan Adi dengan PDR melahirkan respon yang beragam atas prospek politiknya di tahun 2004. Sebagian pesimis. Jika masih berkuasa saja Adi gagal membangun partai, apalagi dalam kondisi sekarang dimana ia tidak berkuasa. Namun sebagian tetap optimis mengingat Adi Sasono adalah tokoh yang lihai, cerdas dan banyak belajar dari pengalaman.

Eros Djarot sudah memimpin Partai Nasionalis Bung Karno. Tokoh ini sebelumnya malang melintang di dunia kesenian. Ia menjadi legenda ketika membuat musik Badai pasti Berlalu. Kembali berhasil membuat film Cut Nyah Dien. Juga berhasil ketika membidani Tabloid Detik. Peran politiknya mulai terdengar ketika ia dekat dengan Megawati, sejak era Soeharto. Namun kini hubungan dua tokoh ini tidak lagi harmonis.

Terhadap Eros, publik pun terbelah. Yang pesimis merasa bahwa Eros adalah bintang kesenian. Sedangkan politik punya tuntutan sendiri yang berbeda dengan dunia seni. Ia dianggap pula terlalu cepat naik kelak, disejajarkan dengan tokoh seperti Wiranto dan Adi Sasono. Partainya pun terancam karena nama tokoh "Bung Karno" dilarang menjadi nama partai.

Namun banyak pula pihak yang optimis. Eros dianggap mempunyai tangan yang dingin seperti Midas Touch. Apapun yang disentuh Midas menjadi emas. Apapun yang disentuh Eros akan pula menjadi besar.

Sedangkan Wiranto punya komplikasinya sendiri. Belum diketahui apakah di tahun 2004 nanti ia akan memimpin partai. Memang sudah ada partai buruh yang mencalonkannya menjadi presiden. Persoalannya, perannya di era Orde Baru menyulitkan posisinya untuk menjadi orang nomor satu di republik ini. Jika ia ingin terkesan anti establishment, menarik minat LSM dan anak muda saat ini, terlalu banyak klarifikasi yang ia harus lakukan untuk menjelaskan perannya di era Orde Baru. Jika ia ingin merangkul kekuatan lama di era Soeharto, ia pun sudah tanggung bergaul dengan para “pendekar” demokrasi di LSM.

Fuad Bawazeir agaknya paling diuntungkan. Berbeda dengan tiga rekannya di atas, Fuad tidak punya sindrom ingin menjadi orang nomor satu. Selama ini ia bersedia menjadi operator untuk tokoh lain. Sebagai operator, kelihaiannya memang sudah teruji, di samping juga ia berkantong tebal. Di era Soeharto, ia menjadi menteri. Ketika, Amien Rais muncul melawan Soeharto, dalam waktu cepat ia bisa menjadi orang dekat Amien Rais.

Ketika Gus Dur dicalonkan sebagai presiden, Fuad dapat menjadi tokoh penting Poros Tengah. Ketika Gus Dur digoyong, Fuad berperan pula sebagai penggoyangnya. Karena kelihaiannya, Fuad mungkin dapat menjadi “the man of all season.” Apapun musim politik dan siapapun tokoh utamanya, Fuad tetap menjadi tokoh penting.

Publik meyakini bahwa ia kini bekerja untuk terpilihnya Amien Rais sebagai presiden di tahun 2004. Amien sendiri mungkin tidak mengetahui dan tidak perlu menyetujui tindak-tanduk Fuad. Sebagai politisi, Fuad sangat mandiri dan bisa menghitung sendiri semua kalkulasinya.

Bagaimana prosepek politik empat tokoh ini: Wiranto, Eros, Adi dan Fuad? Persoalannya di tahun 2004 sudah ada partai lama. Sulit membayangkan aneka partai besar yang kini ada tersingkir. Kecuali jika terjadi peristiwa yang buruk sekali,

sudah dapat dibayangkan bahwa partai terbesar satu sampai lima tetap saja PDIP, Golkar, PPP, PKB dan PAN.

RUU Pemilihan Presiden yang sedang digodok, sudah pula membuat prinsip yang tidak menguntungkan partai kecil. Kelak yang dapat mencalonkan presiden hanya lima partai terbesar dalam pemilihan DPR. Calon presiden agaknya kembali hanya berputar di elit PDIP, Golkar, PPP, PKB dan PAN. Hanya keajaiban dan tragedi besar yang dapat mengubah ranking partai besar saat ini.

Di tahun 2004, nasib Adi Sasono, Eros Djarot dan Wiranto untuk menjadi calon presiden sangat kecil, karena RUU pemilihan presiden itu. Sementara Fuad Bawazier diuntungkan karena Amien Rais yang menjadi tumpuan harapannya, termasuk satu dari lima partai besar itu.

Jika semua asumsi dan prediksi di atas benar, dibandingkan Adi Sasono, Eros Djarot dan Wiranto, maka Fuad Bawazier-lah yang paling diuntungkan oleh maraknya aksi protes belakangan ini. Aksi protes ini membuatnya mampu melemahkan posisi Megawati semaksimal mungkin agar citra Megawati terpuruk di tahun 2004. Sehingga tokoh yang ia dukung akan lebih mudah mengalahkan Megawati.

Sejauh tidak melanggar hukum, apa yang dilakukan Fuad sah-sah saja dan memang dibolehkan dalam negara demokrasi. Namun tentu saja publik memiliki kearifannya sendiri untuk membuat penilaian.

Bagian Kedua
Seputar Reformasi

Kompromi Soal Konstitusi?

BAYANGKAN skenario berikut. Saat itu, pada Agustus 2002, Ketua MPR M. Amien Rais didampingi oleh ketua MPR lainnya menghadapi puluhan wartawan dalam konferensi pers. “Saudara-saudara sekalian” ujar Amien Rais, “atas nama lembaga tertinggi negara, MPR, saya ingin menyampaikan pengumuman penting. Bahwa kami gagal bersepakat tentang amandemen UUD 45 untuk pasal-pasal yang krusial. Beberapa kali sidang MPR tidak memenuhi kuorum karena banyaknya anggota yang secara sengaja tidak hadir. Setelah kuorum diusahakan berhasil, MPR gagal pula mendapat dukungan 2/3 dari yang hadir untuk amandemen.”

Lalu, Amien Rais menjelaskan soal aneka pasal, dan topik masalah yang gagal diamandemen. Antara lain soal Utusan Golongan. Pihak yang ingin mengubah Utusan Golongan tidak mendapatkan dukungan mayoritas. Begitu pula dengan pembentukan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pembentukan DPD dianggap membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahkan menurut Amien Rais, topik amandemen gelombang ketiga banyak yang digugat kembali. Soal pemilihan presiden, misalnya. Kesepakatan tahun lalu bahwa presiden dipilih langsung di putaran pertama, digugat kembali. Begitu pula dengan status MPR. Sebelumnya ada keinginan mengubah bahwa kedaulatan rakyat dijalankan menurut UUD. Kini bunyi itu ingin dikembalikan menjadi kedaulatan rakyat dijalankan oleh MPR. Bahkan, kehadiran Mahkamah Konstitusi pun digugat kembali.

Di luar gedung MPR, terlihat ribuan massa Islam mengibarkan bendera agar Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam konstitusi. Sementara itu, diujung sebelah sana, aksi dengan slogan sebaliknya terjadi. Massa yang sama banyaknya menolak Piagam Jakarta.

Puluhan aktivis LSM juga sibuk membagi-bagikan brosur pentingnya dibentuk Komisi Konstitusi yang independen. Brosur itu banyak mengkritik buruknya kerja MPR dan konservatisme aneka partai politik yang telah menghambat reformasi konstitusi.

Jelaslah politik menjadi sangat panas. Aneka kekuatan politik menjadi tegang. Berbagai lobi, rumor dan kasak-kusuk dilakukan tidak hanya di gedung MPR, tetapi juga di berbagai kota besar. Beredar pula isu akan datang dekrit presiden untuk kembali ke UUD'45 secara murni dan konsekuen. Sekali lagi, Indonesia berada dalam situasi politik yang rawan.

Gambaran di atas bukan imajinasi liar yang mustahil terjadi. Ini adalah skenario terburuk yang mungkin menjadi kenyataan pada Agustus 2002. Kini secara riil kita menyaksikan dua kubu politik yang sangat bertentangan soal amandemen

UUD'45. Kedua kubu ini terus mencari pengaruh dan berusaha memenangkan pertarungan amandemen konstitusi di MPR atau pun pertarungan opini publik di luar MPR.

Kubu pertama adalah pihak yang ingin amandemen itu dihentikan. Oleh lawan politik, mereka kini diidentifikasi sebagai kalangan nasionalis garis keras yang ada di PDIP, Utusan Golongan, TNI/Polri-terutama yang sudah purnawirawan-pakar konstitusi dan beberapa partai lain. Motif penolakan atas amandemen itu beragam.

Sebagian penolakan itu bersandar pada keyakinan ideologi. Mereka beranggapan bahwa amandemen UUD'45 yang kini dilakukan sudah mengubah paradigma dan ideologi UUD'45 itu sendiri. Prinsip negara kesatuan akan ditukar secara samar, tetapi pasti dengan sistem bilateral. Dengan adanya DPD, daerah justru akan semakin sulit dikendalikan oleh pemerintah pusat. Indonesia menjadi negara setengah federasi.

Sebagian lagi, penolakan itu karena kepentingan politik praktis jangka pendek. Mereka yang berada di Utusan Golongan tidak ingin dihapuskan dari kenggotaan MPR di masa datang. Apalagi diyakini bahwa Utusan Golongan adalah warisan unik pemikiran pendiri bangsa (founding fathers) yang cemerlang. Jika tidak ada Utusan Golongan, TNI/Polri akan pula tersingkir tidak hanya dari DPR, tetapi juga dari MPR.

Disisi lain, kubu kedua justru sangat gencar mendorong amandemen secara tuntas. Mereka terutama datang dari Partai Golkar, PAN. Kubu ini didukung pula oleh aneka kekuatan masyarakat, seperti LSM. Lebih radikal dari partai, koalisi LSM bahkan menginginkan konstitusi yang sama sekali baru. Kubu ini berkeyakinan bahwa konstitusi adalah fondasi bagi sistem politik. UU'D'45 tidak memenuhi syarat menjadi fondasi bagi politik demokratis karena aneka cacat yang secara inheren terkandung dalam filosofi UUD'45 itu sendiri.

Dua kubu ini jelas tidak dapat didamaikan. Bagaimana solusinya? Bagaimana memecahkan deadlock di MPR jika itu terjadi? Apakah polarisasi dua kubu itu dibiarkan saja dengan seluruh kemungkinan buruknya?

Solusi agaknya mulai dikembalikan oleh TNI/Polri. Fraksi TNI/Polri kini mengembangkan jalan tengah, semacam kompromi konstitusi. Jalan tengah ini, pada waktunya, agaknya juga akan diikuti oleh PDIP, dan aneka partai lain.

Seperti lazimnya, jika dua kubu tidak dapat didamaikan, akhirnya jalan tengah yang akan memperoleh dukungan paling luas secara politik. Dipropagandakan kemudian bahwa jalan tengah ini tidak ideal, namun inilah yang paling realistis mengingat situasi politik saat ini.

Adapun jalan tengah yang terjadi dapat kita bayangkan sebagai berikut. Pertama, amandemen UUD'45 harus diteruskan dan dituntaskan tahun ini juga. Menunda amandemen justru membuat kondisi politik semakin rawan. Kedua, amandemen UUD'45 tetap dikerjakan oleh MPR, tidak oleh lembaga lain, seperti Komisi Konstitusi. Ketiga, ada pasal yang tetap, ada pula pasal yang diubah sekadarnya. Kompromi soal konstitusi merupakan platform dari jalan tengah itu.

Ada kompromi soal Utusan Golongan. Utusan Golongan sangat mungkin tidak akan dihapuskan dari komposisi MPR. Namun, hak Utusan Golongan dikurangi. Untuk memilih presiden dan wapres, mereka absen. Mereka hanya ikut bersidang dan voting untuk menetapkan GBHN. Jumlahnya mungkin pula dikecilkan, tidak lagi 65 anggota.

Ada kompromi soal perwakilan daerah. Utusan Daerah diberi hak sebagai fraksi. Pimpinan MPR juga akan diisi oleh wakil dari Utusan Daerah. Namun mereka tidak diberi satu badan sendiri, seperti DPD. MPR tetap menjadi monokameral,

tidak bikameral. Apalagi ada bukti statistik bahwa 80 persen dari negara kesatuan itu bersifat monokameral.

Ada kompromi soal pemilihan presiden. Isu pemilihan presiden secara langsung memang punya daya pikatnya sendiri. Usul ini tidak sepenuhnya dikabulkan dan tidak sepenuhnya ditolak. Pemilihan langsung hanya untuk putaran pertama, sementara putaran kedua tetap dipilih oleh MPR.

Ada pula kompromi soal status MPR. Lembaga MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara. Tetapi, lembaga ini tidak lagi membuat Tap yang menjadi landasan undang-undang yang lebih rendah. MPR hanya menyiapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Akankah kompromi seperti ini yang akan menjadi jalan tengah deadlock konstitusi?

Kompromi soal politik praktis adalah lazim. Tetapi kompromi soal konstitusi, tidakkah justru membuat konstitusi seperti tidak berjenis kelamin?

Terganjalnya Politik Reformasi

EMPAT tahun usia gerakan reformasi sudah cukup memberikan gambaran. Ada yang pasti, bahwa transisi menuju demokrasi memang sedang terjadi di Indonesia. Kebebasan politik dan partisipasi politik sudah dirasakan oleh semua komunitas. Namun ada pula yang tidak pasti, bahwa demokrasi di Indonesia belum tentu akan terkonsolidasi. Jika tidak terkonsolidasi, demokrasi itu ibarat tamu yang datang sesaat kemudian pergi kembali. Kitapun kembali ke era otoritarian, cepat ataupun lambat.

Demokrasi yang terkonsolidasi mensyaratkan satu hal penting. Semua elit yang berpengaruh mesti sepakat bahwa prinsip demokrasi menjadi the only game in town, satu-satunya aturan main yang dijunjung. Para elit itu boleh berbeda pandangan tentang semua hal, mulai dari kebijakan ekonomi, ideologi sampai kebijakan politik. Namun mereka harus sepakat, bahwa perbedaan itu diselesaikan dengan aturan main

demokratis. Mereka tidak lagi mencari aturan main di luar prinsip demokrasi.

Aturan main demokrasi kemudian dikokohkan ke dalam konstitusi. Semua pemain politik terikat dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan cita-cita politik kolektif. Demokrasi hanya akan terkonsolidasi jika didahului oleh reformasi konstitusi. Aneka prinsip demokrasi tidak lagi hanya menjadi wacana para pejuang dan pemikir namun sudah menjadi basis legal karena tertulis dalam konstitusi yang direformasi.

Justru pada titik inilah problem terbesar dari reformasi kita. Tidak semua elit yang berpengaruh sepakat bahwa demokrasi sebagai the only game in town. Sebagian masih memperjuangkan prinsip politik yang sektarian. Sebagian lagi ingin menghambat proses demokratisasi karena terlalu khawatir dengan perubahan yang radikal dan liberal.

Setelah empat tahun reformasi, yang sangat terasa adalah bangkitnya kembali konservatisme politik. Kelompok konservatif ini yang mengganjal arus reformasi. Konservatisme ini berasal dari dua kubu politik. Yang mengkhawatirkan, kubu ini tidak hanya berhasil mendapatkan dukungan berbagai kekuatan civil society, namun juga mulai membonceng partai politik yang tengah berkuasa.

Kubu konservatif pertama berasal dari kalangan nasionalis garis keras. Mereka menentang sistem perwakilan rakyat yang murni demokratis. Dalam prinsip demokrasi, perwakilan rakyat baik di DPR ataupun di MPR harus ditentukan oleh rakyat sendiri. Mekanismenya melalui pemilu, baik langsung ataupun tidak langsung. Tidak ada lagi perwakilan rakyat yang diangkat.

Kubu ini sekuat tenaga masih berupaya mempertahankan keberadaan utusan golongan yang diangkat. Di samping alasan bahwa ini konsep dari the founding fathers, acapkali

pula pengangkatan anggota parlemen di negara lain dijadikan pembandingan untuk melegitimasi keberadaan Utusan Golongan.

Secara historis, pada awalnya, memang anggota parlemen itu tidak dipilih karena ia wakil dari the noble family, para tuan tanah di Eropa yang berkuasa. Namun melalui waktu, anggota wakil rakyat yang tidak dipilih semakin tidak populer, walau masih ada sisanya di berbagai negara demokratis. Mengapa kita harus meniru pola pengangkatan yang justru mulai ditinggalkan.

Hal lain yang ingin dipertahankan oleh nasionalis garis keras ini adalah posisi MPR sebagai the supreme body. Mereka menentang prinsip checks and balances dimana setiap lembaga tinggi negara harus sejajar agar bisa saling mengontrol. Sistem demokrasi dibuat dengan asumsi bahwa setiap lembaga selalu mungkin membuat kesalahan. Karena itu, lembaga itu harus dapat dikontrol oleh lembaga lainnya agar kesalahan dapat diminimalisasi. MPR sebagai the supreme body, lembaga tertinggi, jelas bertentangan dengan prinsip ini.

Kubu konservatif kedua berasal dari kalangan Islam garis keras. Kubu ini masih terus memperjuangkan Piagam Jakarta. Mereka ingin “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” masuk ke dalam konstitusi. Jika ini dilakukan akibatnya negara juga berkewajiban menjaga agar syariat Islam dijalankan oleh penganut Islam. Mereka yang tidak menjalankan syariat Islam dengan sendirinya dapat dianggap melanggar konstitusi. Konsekuensi lainnya, dibutuhkan polisi agama untuk mengontrol siapa saja umat Islam yang tidak melaksanakan syariat Islam.

Keinginan ini pun menentang prinsip demokrasi. Dalam negara demokrasi, jelas semua warga punya hak asasi untuk menjalankan syariat agama masing-masing. Namun negara tidak diberikan wewenang untuk mengontrol syariat agama warga negara. Itu diserahkan sepenuhnya kepada kebebasan

individual dan komunitas agama warga yang bersangkutan. Apalagi ada perbedaan internal pada masing-masing agama mengenai apa dan bagaimana syariat itu.

Dalam prinsip demokrasi, negara bersikap netral atas agama dan interpretasi agama. Konstitusi sebagai dokumen sosial tidak mengatur soal kewenangan negara atas agama. Juga konstitusi tidak menjadikan negara menjadi instrumen agama atau salah satu agama. Dalam konstitusi, hak beragama hanya diatur secara umum saja dalam hak asasi. Piagam Jakarta dengan sendirinya bertentangan dengan demokrasi.

Yang membuat kubu konservatif ini kuat karena mereka masuk ke dalam lingkaran dalam partai yang berkuasa. Konservatif dari kubu nasionalis garis keras memboncengi PDI-P, partai terbesar dan partainya Presiden. Memang tidak semua anggota PDI-P konservatif. Banyak pula anggota PDIP yang liberal terutama di kalangan mudanya. Tetapi konservatif nasionalis garis keras terus mengendap-ngendap dalam partai ini.

Sedangkan kubu konservatif dari Islam garis keras masuk ke dalam partai tiga terbesar, PPP, yang juga menjadi partainya wakil presiden. Secara publik, PPP menyatakan mendukung Piagam Jakarta. Dalam PPP tentu saja banyak pula anggota yang moderat dan liberal keislamannya. Namun konservatisme garis keras terus pula mengendap-endap dalam partai ini.

Tidak berlebihan jika empat tahun reformasi membuat banyak pihak khawatir. Selalu mungkin kubu konservatif ini, baik nasionalis ataupun Islam, yang keduanya garis keras, terus menguat. Sementara kubu nasionalis dan Islam yang moderat atau yang liberal, selalu ragu untuk bertindak tegas. Inilah resikonya jika para politisi yang pro pada reformasi tidak menang mutlak pada pemilu lalu. Politisi konservatif akibatnya terus menggantal di semua lini. Pada peringatan gerakan

reformasi ke lima tahun depan, akankah kita justru bertambah pesimis lagi?

Larangan Pejabat Berkampanye

APAKAH sebaiknya para pemimpin partai yang kini menjadi presiden, wakil presiden dan menteri harus dilarang berkampanye? Jika ingin berkampanye haruskah mereka mengundurkan diri dulu dari jabatan publik? Pertanyaan ini masih menjadi isu hangat menyertai perdebatan tentang RUU Pemilu yang dipersiapkan sebagai kerangka aturan main Pemilu 2004.

Sudah diduga, pandangan mayoritas cenderung menjadi ekstrem. Umumnya politisi, pengamat dan akademisi dan intelektual menyarankan agar para pejabat itu dilarang berkampanye. Tulisan ini justru berpandangan sebaliknya. Baik di Amerika Serikat ataupun Inggris, presiden dan perdana menteri dibolehkan berkampanye untuk pemilihan anggota parlemen, apalagi berkampanye agar dirinya terpilih kembali.

Ada dua berita yang dapat di baca melalui internet. Berita pertama adalah kampanye dari Presiden Clinton sendiri. Berita

ini dilansir dari AP General Election News, Rabu 1 November 2000. Diceritakan, bagaimana Presiden Clinton, walau masih menjadi presiden, begitu sibuk kampanye agar rekannya dari Partai Demokrat terpilih menjadi anggota Konggres ataupun Senator.

Di Kentucky, sang presiden berkampanye sosial untuk aktivis pekerja sosial asal Partai Demokrat agar terpilih. Kemudian, sang presiden terbang pula ke NewYork, khususnya wilayah kulit hitam Harlem. Wilayah ini dikenal sebagai kubu Partai Demokrat. Presiden Clinton datang untuk mengingatkan para pendukung Partai Demokrat di wilayah itu agar berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) agar calon Partai Demokrat yang terpilih.

Selesai kampanye di Harlem, Presiden Clinton tidak lupa pula berkampanye untuk Hilary Rodham Clinton melawan saingan dari Partai Republik. Tidak ada kecanggungan sang presiden untuk berkampanye walau untuk Hilary, yang kebetulan istrinya sendiri.

Berita kedua dapat dilacak di Election Scotsman.com. Berita ini mengenai Pemilu di Inggris. Antara lain memuat potongan kampanye pada tahun 1997 . Saat itu yang berlaga adalah Perdana Menteri John Major dari Partai Konservatif melawan Tony Blair dari Partai Buruh. Kehadiran Tony Blair, yang rnuda dan energik, sangat fenomenal. Penduduk Inggris menyebut Tony Blair sebagai John F. Kennedy versi Inggris.

Sementara itu, John Major adalah penerus pemerintahan Margareth Teacher. Konsevatisme yang dibawa partai ini sempat mengubah panggung dunia tahun 1980-an. Sebagai perdana menteri, John Major berkampanye agar the House of Commons tetap didominasi oleh partainya. Melawan Tony Blair yang sangat energik, Perdana Menteri John Major membalas dengan kampanye all out, yang akan menentukan karier politiknya sendiri.

Setidaknya, dari berita itu kita tahu betapa seorang presiden dan perdana menteri tidak dilarang berkampanye untuk pemilihan anggota DPR (Kongres, House of Commons). Mengapa di dua negara yang dianggap kampium demokrasi yang sudah berumur ratusan tahun para politisi dan intelektualnya tidak melarang presiden dan perdana menteri berkampanye? Padahal dua negara itu menganut dua demokrasi yang berbeda, yang satu menganut presidensialisme, dan yang lainnya menganut sistem parlementerisme?

Negara demokrasi, sebagai mana dipraktekkan di Amerika Serikat dan Inggris, memberikan semua fasilitas yang diperlukan agar sang pemimpin sukses memerintah. Jika sang pemimpin itu berhasil, yang akan memperoleh keuntungan adalah rakyat banyak. Presiden dan Perdana Menteri dibolehkan kampanye untuk mencari dukungan. Masa kampanye pemilihan anggota perwakilan rakyat adalah periode yang penting untuk memperkuat dukungan politik bagi pemimpin eksekutif.

Dalam sistem presidensialisme, seperti Amerika Serikat, tetap penting bagi seorang presiden punya dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mayoritas di parlemen dapat terjadi apa yang disebut dengan the divided government. Istilah ini merujuk pada pemerintahan yang terbelah, dengan presiden dikuasai oleh Partai Demokrat, misalnya, sementara parlemen dikuasai oleh Partai Republik.

Jika pemerintahan terbelah, selalu mungkin terjadi deadlock atau jalan buntu. Pemerintah menjadi lumpuh. Aneka kerja sama presiden dan parlemen dalam pembentukan undang-undang dan anggaran negara macet. Publik luas yang akan menderita kerugian. Untuk menghindari hal ini, dan juga karena tidak dilarang dalam prinsip demokrasi, presiden dibolehkan berkampanye agar sebanyak mungkin anggota partainya mendominasi parlemen, menghindari the devided government.

Sementara itu, di Inggris, yang menganut sistim parlementer, kampanye perdana menteri bagi anggota parlemen jauh lebih substansial. Perdana Menteri diangkat dan dapat dijatuhkan oleh parlemen. Jika anggota parlemen didominasi oleh partai lawan, dengan sendirinya akan lahir mosi tidak percaya (vote of no confidence). Sang perdana menteri akibatnya dapat dijatuhkan dan diganti. Agar hal ini tidak terjadi, perdana menteri juga dibolehkan berkampanye untuk memperkuat kakinya di parlemen. Apakah uang negara digunakan dalam kampanye itu? Tentu saja ada uang negara yang di gunakan karena tidak terhindari. Keselamatan presiden dan perdana menteri harus dijaga. Setidaknya harus tetap ada petugas keamanan yang dibiayai negara untuk menjaga mereka. Jika pemimpin tertinggi itu terbunuh, kerugian negara akan lebih banyak. Untuk kampanye bagi kepentingan partai, uang negara-tidak bisa tidak-memang terpakai juga. Namun, pemakaian uang negara itu dalam batas minimal, sejauh tidak terhindari.

Apakah presiden dan perdana menteri cuti selama berkampanye? Sama sekali tidak. Presiden dan perdana menteri tetap bertugas sebagai kepala pemerintahan. Selama periode memerintah, lima tahun sekali, atau empat tahun sekali, toh, kampanye tidak berlangsung selamanya. Umumnya kampanye hanya memakan waktu satu sampai tiga bulan. Pemimpin tertinggi tidak perlu setiap hari berkampanye. Pemimpin tertinggi juga tidak perlu setiap hari berkantor mengurus negara di era kampanye. Sejauh masalah kenegaraan tidak terganggu, tidak ada yang meributkan kampanye presiden dan perdana menteri itu.

Jelaslah, jika ada Undang-Undang Pemilu di Indonesia yang melarang pemimpin partai yang menjadi pejabat publik berkampanye, pastilah undang-undang itu tidak dibuat oleh mereka yang memahami teori dan praktek demokrasi di dunia nyata.

Selamat Datang Konstitusi Baru

SELAMAT datang konstitusi baru. Mungkin ini ucapan hangat yang paling ramah kepada Sidang Tahunan MPR 2002. Sungguhpun konstitusi yang diamandemen masih diberikan nama yang sama, UUD 45, tetapi secara substansial kita sebenarnya memiliki sebuah konstitusi baru.

Dengan datangnya konstitusi baru, bukan hanya suka cita yang perlu kita ekspresikan. Sebaliknya, mulai saat ini juga kita harus mencari aneka kelemahan yang inheren dalam konstitusi baru. Komisi Konstitusi yang dibentuk tahun depan akan menyempurnakan kelemahan itu.

Jika terdapat potensi konflik kelembagaan antar lembaga negara di dalam konstitusi baru itu, niscaya ini akan menjadi virus yang berbahaya. Jika tidak secepatnya disempurnakan, konflik kelembagaan dapat kembali membuat politik nasional gunjang-ganjing. Persoalan menjadi semakin rumit jika belum ada aturan hukum tertulis sebagai solusi konflik kelembagaan itu.

Pada titik ini kita menemukan setidaknya potensi konflik antara lembaga presiden dan lembaga DPR. Melalui amandemen ketiga dan keempat, kita segera memiliki presiden yang sangat kuat, untuk tiga alasan. Pertama, presiden yang akan datang adalah presiden yang secara langsung didukung oleh mayoritas pemilih (melalui putaran pertama dan putaran kedua). Presiden yang akan datang berhak mengklaim bahwa mayoritas rakyat Indonesia berada di belakangnya.

Kedua, presiden juga memiliki wewenang mutlak untuk menolak Undang-Undang. Amandemen UUD 45 mengatur bahwa Undang-Undang harus disetujui secara bersama oleh DPR dan Presiden. Jika presiden tidak menyetujui, maka mustahil sebuah RUU menjadi UU. Khusus kasus ini, Presiden Indonesia kelak akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Presiden Amerika Serikat (AS). Di AS, DPR masih punya hak untuk membatalkan ketidaksetujuan presiden atas RUU jika DPR itu didukung oleh mayoritas 2/3 suara.

Ketiga, Presiden Indonesia semakin susah untuk dipecat. Berbeda dengan sebelumnya, konstitusi hasil amandemen ini mengatur keharusan adanya validasi terlebih dahulu dari Mahkamah Konstitusi. Harus ada bukti hukum bahwa sang presiden benar melanggar yang dituduhkan. Namun Mahkamah Konstitusi hanya melakukan validasi jika ada permintaan mayoritas 2/3 dari DPR. Validasi dari Mahkamah Konstitusi juga harus pula disetujui oleh mayoritas 2/3 MPR.

Mungkin Indonesia akan meniru praktek politik di Amerika Serikat. Selama lebih 200 tahun merdeka, tidak ada seorang presidenpun yang berhasil dipecat oleh Kongres AS. Dengan prosedur yang harus disetujui oleh mayoritas DPR dan MPR, serta melalui validasi Mahkamah Konstitusi, hampir mustahil pula ada seorang presiden yang akan dipecat di Indonesia. Kecuali sang presiden itu melakukan kejahatan hukum yang terlalu mencolok mata.

Sementara kita juga mempunyai DPR yang kuat. DPR memiliki hak untuk membuat undang-undang dan anggaran negara. Tanpa persetujuan DPR, mustahil undang-undang dan anggaran negara dapat diadopsi. DPR juga memiliki wewenang lain. Untuk menyatakan perang, mengangkat duta besar, panglima TNI, panglima Polri, abolisi dan amnesti, presiden harus mendapat persetujuan (mendapatkan pertimbangan) dari DPR. Tentu saja DPR dapat mengklaim yang sama bahwa mayoritas rakyat dibelakangnya karena anggota DPR juga dipilih secara langsung.

Maka UUD 45 yang sudah diamandemen melahirkan apa yang disebut dengan dual legitimacy. Dua lembaga yang sama penting, presiden dan DPR, dua-duanya dipilih langsung, dan memiliki kekuatan politik yang relatif sama. Apa jadinya jika dua lembaga ini dikuasi oleh dua partai yang berbeda? Apa yang akan terjadi jika dua lembaga ini dikuasi oleh partai yang punya program politik saling bertentangan?

Dalam konteks sistem multi partai, pertanyaan di atas sangat mungkin terjadi. Ambil contoh, di tahun 2004, Megawati terpilih kembali menjadi presiden. Atau katakanlah, Amien Rais yang memenangkan pemilihan presiden. Tetapi di DPR setelah pemilu 2004, suara PDIP tetap sama, sekitar 35%. Atau jika Amien Rais menjadi presiden, suara PAN di DPR 2004, katakanlah melonjak namun tetap di bawah 30%. Ini berarti mayoritas partai di DPR tidak datang dari partai presiden.

Kondisi ini menghasilkan *divided government*, atau pemerintahan terbelah. Oposisi terhadap presiden menguasai DPR. Oposisi dapat menggunakan DPR untuk melawan kebijakan presiden. Akibatnya hubungan kerja presiden dan DPR berada dalam situasi *deadlock*, atau *immobilism*. Ini situasi dimana tidak ada undang-undang yang dapat dilahirkan atau anggaran negara yang disepakati karena presiden dan DPR tidak pernah sepakat.

Situasi *divided government*, *deadlock* dan *immobilism* di atas bukan hanya spekulasi teoritik. Itu kondisi riil yang terjadi akibat adanya *dual legitimacy*. Tidak heran jika Scott Mainwaring, ahli politik perbandingan yang sangat ternama, selalu memberikan peringatan. Menurutnya, adalah kekeliruan besar jika kita menerapkan sistem *presidensialisme* dalam konteks multi partai. Demokrasi dapat dibunuh secara demokratis jika presiden dipilih langsung berikut hak *presidensialismenya* jika sistem kepartaian begitu terfragmentasi. Dalam konstruksi itu, politik akan sangat tidak stabil dan goyah, karena konflik kelembagaan antara presiden dan DPR sulit didamaikan.

Rekomendasinya itu ia berikan berdasarkan pada data penelitian. Ia mencoba mencari korelasi antara demokrasi yang stabil, dengan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian. Demokrasi yang stabil ia rumuskan sebagai bentuk demokrasi yang dapat bertahan selama 25 tahun tanpa interupsi rezim otoritarian. Sementara sistem pemerintahan, ia bagi pada sistem *presidensialisme murni*, sistem *parlementarianisme murni* dan sistem campuran. Sedangkan sistem kepartaian ia bagi menjadi sistem multi partai dan sistem dua partai.

Ia mendapatkan data yang mengejutkan. Demokrasi yang stabil dengan pemerintahan *presidensialisme*, dimana presidennya dipilih langsung, hanya terdapat di enam negara: Chili, Costa Rica, Columbia, United States, Uruguay dan Venezuela. Demokrasi stabil lainnya yang begitu banyak jumlahnya terdapat bukan dalam sistem *presidensialisme murni*. Sementara di antara enam negara *presidensialisme* itu, hanya satu yakni Chili, yang rnenganut sistem multi partai. Kasus Chili adalah pengecualian.

UUD 45 yang sudah diamandemen memang membawa komplikasi kelembagaan antara presiden versus DPR. Semoga kita cepat menemukan solusi untuk mencegah kasus *divided goverment* yang berbahaya itu.

Atas Nama Islam

SEBUAH kerikil dalam ekspresi kebebasan. Inilah respons spontan yang muncul mengikuti aktivitas kelompok Islam Mujahidin. Belum selesai kasus tekanan mereka kepada RCTI dan SCTV atas iklan “Islam ‘Warna-warni”, kini kembali mereka menekan TPI dan Lativi atas iklan “Kondom Anti HIV/AIDS”. Atas nama Islam, mereka mengancam media elektronik agar tidak lagi menyiarkan iklan itu.

Praktis, kejadian ini tidak banyak mendapatkan porsi berita di media massa. Namun, secara perlahan, peristiwa ini akan cepat menjadi virus dan membahayakan kelangsungan proyek demokrasi yang secara susah payah sedang kita bangun.

Di Indonesia, atau di mana pun, demokrasi akan sulit terkonsolidasi tanpa menguatnya kultur demokrasi. Sementara itu, kultur demokrasi sulit menguat jika elit yang berpengaruh tidak menghormati keragaman pandangan. Di negara yang makin kompleks, setiap individu memiliki riwayat hidupnya sendiri. Suka ataupun tidak dalam wilayah sebuah negara

nasional, akan terdapat banyak sekali keberagaman tidak hanya dalam cara berpikir, tetapi juga dalam hal ideologi, agama, interpretasi agama, serta gaya hidup.

Negara otoriter melarang keberagaman itu. Namun, demokrasi justru membiarkannya, sebagaimana sebuah kebun yang membiarkan seribu bunga berkembang. Demokrasi bahkan membolehkan setiap individu untuk mempengaruhi pihak lain, melalui aneka saluran yang diakui oleh sistem demokrasi, seperti media massa, seminar, atau pelatihan. Politik pada dasarnya adalah forum untuk mempengaruhi publik. Jika sebuah ide dilarang dikampanyekan, lalu apa gunanya ruang publik?

Inilah yang dilakukan kelompok Mujahidin. Mereka melarang pihak yang berbeda pandangan untuk berkampanye. Mereka menekan SCTV dan RCTI untuk tidak mengiklankan kampanye Islam Liberal. Padahal, Islam Liberal tentu punya hak untuk berpikir dan kampanye bahwa Islam itu warna-warni. Sebagaimana kelompok Mujahidin juga punya hak untuk berpikir bahwa Islam itu tidak warna-warni tetapi tunggal.

Atas nama Islam, kelompok Mujahidin kini kembali bereaksi atas iklan “Kondom Anti-HIV/AIDS”. Satu hal yang wajar jika mereka tidak setuju dengan kampanye kondom, kampanye anti AIDS, ataupun kampanye terselubung yang tidak melarang seks bebas. Namun, kelompok ini melangkah terlalu jauh jika mereka mengancam media untuk tidak menyiarkan aneka gaya hidup yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Hal sebaliknya dapat ditanyakan, apakah kelompok Mujahidin ini juga rela jika gaya hidup mereka dilarang disosialisasikan melalui media?

Kultur demokrasi hanya dapat bertahan jika berdiri di atas prinsip yang diletakkan Voltaire. Filsuf Prancis ini suatu ketika menyatakan “Saya tidak setuju pendapat Tuan, namun hak Tuan menyatakan pendapat itu akan saya bela sampai mati”. Pernyataan ini yang kemudian menjadi prinsip terpenting dalam kebebasan berpendapat. Islam Liberal boleh saja tidak setuju

pendapat kelompok Mujahidin, namun hak untuk menyatakan pendapatnya harus dibela. Hal yang sebaliknya juga harus terjadi.

Media massa harus tetap dibolehkan menyalurkan semua opini yang bertentangan itu. Sekali ada satu kelompok yang mulai menekan dan mengancam agar pandangan tertentu tidak disiarkan, maka ibarat tinju, kelompok itu bertarung dengan memukul bagian di bawah perut. Dalam pertandingan profesional, sang petinju itu seharusnya didiskualifikasi dan dianggap tidak layak untuk ikut dalam sebuah pertandingan yang fair.

Namun, tentu saja sangat absurd jika kita berharap semua kelompok untuk menghormati perbedaan pendapat dan prinsip demokrasi di atas. Di manapun bahkan di Eropa Barat dan Amerika Serikat sekalipun, akan tetap ada individu atau kelompok yang ingin memonopoli kebenaran. Lalu atas nama "Tuhan" kelompok ini merasa berhak menentukan mana yang boleh dan tidak boleh disiarkan secara publik.

Untuk menghadapi kelompok ini, dunia pers serta media, pemerintah dan civil society yang peduli dengan kultur kebebasan mesti mengembangkan respons yang konsisten. Kalangan pers dan media adalah pihak yang sangat berkepentingan dengan kebebasan. Hanya dengan kebebasan itu mereka dapat melakukan investigasi dan menyiarkan aneka informasi. Ibarat ikan, kebebasan itu adalah air bagi pers dan media.

Justru karena pentingnya kebebasan itu, pers dan media harus pula berani memperjuangkannya, dan jangan mudah tunduk oleh tekanan. Kata orang dulu, jika ingin menikmati enaknya nangka, harus juga berani kena getah nangka. Akan jauh lebih baik jika RCTI, SCTV, TPI dan Lativi menganggap ancaman Mujahidin itu sebagai angin lalu saja.

Jika memang perlu ke pengadilan, hadapilah setiap kelompok yang mengancam itu di pengadilan. Jika datang massa yang

demo di stasiun TV, insan media dapat memanggil polisi. Jika akan ada barang dan peralatan studio TV itu yang dirusak, insan media dapat menuntut kelompok yang merusak itu ke pengadilan. Hanya dengan “berkelahi” demi prinsip kebebasan itu, kebebasan akan lebih terjaga oleh mereka yang memang berkepentingan. Toh semua barang berharga di studio TV dapat diasuransikan sebelumnya.

Harga kebebasan akan jauh lebih mahal ketimbang harga peralatan fisik. Jika media elektronik itu terlalu cepat tunduk pada tekanan massa, mereka sendiri akan membesarkan kelompok yang mengancam untuk melakukan kembali hal serupa atau mungkin lebih parah.

Pemerintah melalui polisi harus pula responsif dengan hal itu. Pemilik modal media massa tentu punya hak untuk takut dan tidak berani mengambil resiko. Apalagi jika pemilik modal itu kalangan non-pri dan begitu khawatir dengan isu agama. Mereka sudah bayar pajak dan berhak atas perlindungan. Saya membayangkan akan jauh lebih baik jika Kapolri sendiri membuat pernyataan publik bahwa akan menindak setiap kelompok yang merusak peralatan dan mengganggu kerja studio TV.

Saatnya pula aneka civil society yang relevan berhimpun dalam sebuah koalisi penjaga kebebasan. Mungkin dimotori oleh Islam Liberal, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan lain-lain. Mereka membuat sebuah koalisi khusus untuk membantu pers atau media yang diancam. Mereka menyediakan tidak hanya ahli hukum, bahkan jika perlu juga menyediakan massa tandingan untuk demo.

Apa boleh buat. Kebebasan begitu penting untuk dilindungi. Jika tidak dijaga secara all out, demokrasi akan digantikan oleh mobokrasi, pemerintah oleh aksi massa.

Kini Mereka Saling Menembak

SEPULUH orang tewas, terdiri dari empat anggota Brimob, satu anggota TNI, dua anggota Polres, dan tiga warga sipil. Mereka korban langsung dari kontak senjata selama sembilan jam, antara pasukan TNI AD dari Batalyon Lintas Utara (Linud) 100/ Prajurit Setia (PS), dengan aparat kepolisian dari pasukan Brimob Kompi A Polda Sumatera Utara di Kota Binjai.

Niscaya peristiwa ini akan dicatat sebagai salah satu titik paling hitam gerakan reformasi di bidang keamanan. Bentrok antara tentara dan polisi di Binjai itu bukan yang pertama. Sebelumnya sudah pula terjadi bentrok serupa antara tentara dan polisi di Ambon, Jakarta, Sampit sampai dengan Madiun. Picu konflik juga beragam: mulai dari rebutan kavling keamanan, perlindungan terhadap provokator kerusuhan, beking atas narkoba, sampai masalah rusaknya koordinasi.

Apa yang salah dengan gerakan reformasi? Mengapa setelah reformasi aparat keamanan dan pertahanan yang seharusnya

menjadi garda terdepan pelindung masyarakat malah baku tembak antar mereka sendiri?

Gerakan reformasi agaknya memang tidak memberikan perhatian yang memadai bagi perubahan di lingkungan tentara dan polisi. Akibatnya, komplikasi perubahan internal di tubuh aparat keamanan dan pertahanan itu tidak benar-benar diantisipasi. Tidak ada skenario perubahan atas aparat keamanan dan pertahanan yang sistematis untuk mengurangi kemungkinan saling tembak antar mereka.

Efek yang diberikan gerakan reformasi kepada polisi dan tentara sangat berbeda. Sebelumnya, secara kelembagaan, polisi (POLRI) adalah partner junior tentara. Kapolri dan KASAD, misalnya, berada dalam posisi yang sejajar. Dua petinggi polisi dan angkatan darat itu tunduk kepada panglima ABRI, yang dulu acapkali dijabat oleh petinggi tentara.

Sebelum reformasi, wilayah keamanan juga menjadi otoritas bersama antara tentara dan polisi. Karena tentara secara kelembagaan lebih berkuasa, pelaku dari tentara yang lebih menguasai lapangan keamanan secara de facto. Petinggi polisi hanyalah pelaksana dan partner junior saja dari tentara.

Namun reformasi sudah merubah hubungan tentara dan polisi. Kini Kapolri langsung berada di bawah presiden. Sementara KASAD, yang dulu sejajar dengan Kapolri, berada di bawah panglima TNI. Sedangkan panglima TNI sendiri harus pula berkoordinasi dengan Menteri pertahanan yang juga tokoh sipil. Buah dari gerakan reformasi, secara kelembagaan, posisi polisi (Kapolri) kini jauh di atas tentara (KASAD).

Reformasi telah pula merubah wilayah yurisdiksi. Kini persoalan keamanan sepenuhnya wewenang polisi. Tentara tidak lagi mengurus keamanan tetapi pertahanan saja. Persoalan keamanan yang basah, seperti tempat hiburan, narkoba, perjudian, kini sepenuhnya wilayah polisi. Seandainya ada

pungutan liar di bidang itu, oknum polisi yang memperolehnya. Oknum tentara kehilangan otoritas de jure untuk dapat juga membeking tempat hiburan itu. Bagi oknum polisi atau oknum tentara, jelas pembagian wilayah ini masalah yang sangat besar.

Sementara polisi mendapatkan posisi yang lebih tinggi, lebih berdaulat, akibat reformasi, tentara justru semakin terpinggirkan. Pelan-pelan aneka hak khusus tentara dihilangkan karena tuntutan perubahan. Tentara aktif tidak lagi diperbolehkan menduduki jabatan publik, mulai dari menteri, gubernur, sampai duta besar. Dwi Fungsi ABRI dihilangkan, disimbolkan dengan dihapuskan bidang sosial politik aparat keamanan.

Pada mulanya, tentara aktif masih dibolehkan duduk di DPR/MPR sampai dengan 2009. Namun amandemen di tahun 2002 berujung kepada hilangnya tentara dari DPR/MPR lebih cepat di tahun 2004. Kini bisnis tentara pula dipermasalahkan. Sementara diketahui, anggaran dari APBN untuk pertahanan tidak pernah mencukupi. Kesejahteraan prajurit juga sangat rendah.

Memang benar, depolitisasi itu tidak hanya melanda tentara namun juga polisi. Tetapi berbeda dengan tentara, polisi sudah diberikan kompensasi berupa kemandirian Kapolri yang langsung berada di bawah presiden, dan yurisdiksi mutlak atas wilayah keamanan negara di kala politik normal. Namun sejauh ini, belum ada kompensasi untuk kalangan tentara. Petinggi mereka bahkan kini banyak yang dikejar oleh isu pelanggaran HAM.

Reposisi polisi dan tentara yang tidak berimbang turut menjadi konteks bentrokan keduanya. Gerakan reformasi membuat nasib kedua organisasi keamanan ini sangat berbeda. Di satu sisi, oknum polisi mungkin masih over acting dengan

posisinya yang baru, yang lebih berkuasa, dan tidak lagi tunduk kepada tentara. Di sisi lain, oknum tentara memang secara de jure sudah kehilangan kontrolnya atas polisi, namun secara mental masih merasa lebih senior.

Ketika terjadi proses penyidikan ataupun pengusutan, baik atas kasus narkoba, perjudian, sampai kepada provokasi kerusuhan, tidak jarang, oknum polisi dan tentara bertemu di lapangan. Bentrokanpun terjadi. Karena kedua belah pihak memanggul senjata, maka “perkelahian” tidak terjadi di ruang diskusi atau polemik di koran sebagaimana politisi sipil. Perkelahian itu terjadi secara nyata dengan peluru, dengan darah, dan dengan kematian pihak lawan.

Solusi yang komprehensif atas tentara dan polisi niscaya harus ditemukan. Sangat bahaya keamanan sebuah negara jika aparat yang memanggul senjata tidak puas. Kita pernah mengalami ketidakpuasan tentara sejak kemerdekaan sampai lahirnya Orde Baru. Saat itu isu rasionalisasi tentara menjadi isu besar. Jumlah tentara ingin dipangkas secara drastis dan diprofesionalkan. Akibatnya ada sejumlah petinggi dan prajurit rendah yang akan diberhentikan. Apalagi parlemen saat itu begitu keras pula terhadap tentara. Kebijakan pemerintah pusat atas komunisme juga mengecewakan tentara.

Akibat ketidakpuasan aparat yang memanggul senjata, lahirlah aneka pemberontakan di daerah. Dewan Banteng didirikan. Daerah berontak. Bahkan lahir pula peristiwa 17 Oktober 1952 yang memboyong tentara untuk menyerbu istana. Ujungnya adalah pergolakan yang melahirkan G 30S PKI, dan tumbangnya Orde Lama.

Ketidakpuasan yang rasional dari tentara itu jelas harus diakomodasi. Kesejahteraan prajurit mesti ditingkatkan. Bisnis tentara boleh dinasionalisasi, namun anggaran tentara seharusnya seratus persen ditanggung pemerintah. Di sisi lain,

disiplin secara keras harus pula diterapkan kepada anggota tentara yang melenceng dari sikap tentara profesional.

Gerakan reformasi memang harus lebih mengistimewakan tentara dan polisi. Tidak ada negara yang kuat jika mayoritas aparat keamanan dan pertahanan secara ekonomi menjadi paria dan fakir. Mesti ada upaya sistematis pemerintahan untuk mensejahterahkan mereka, namun pada saat yang sama membuat mereka benar-benar menjadi abdi negara yang profesional.

Upaya sistematis untuk mensejahterakan polisi dan tentara perlu dilakukan sedini mungkin sebelum semuanya terlambat. Jika tidak, bentrokan bersenjata di Binjai itu akan terulang, bahkan mungkin terjadi di level nasional.

Upaya Terakhir Melawan Korupsi?

KORUPSI di Indonesia mempunyai seribu nyawa. Berulang-ulang upaya pemberantasan korupsi dilakukan, sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sarnpai dengan Orde Reformasi. Berbagai aturan baru dibuat. Berbagai komisi untuk mengontrol perilaku korupsi didirikan. Korupsi bukannya menghilang, tetapi justru bertambah dan meluas.

Akhir November 2002 lalu, DPR baru saja menyetujui Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Sebuah Komisi Antikorupsi kembali disetujui. Komisi yang baru itu dilengkapi dengan berbagai kekuasaan yang istimewa. Karena korupsi adalah tindak kriminal yang extraordinary, komisi yang menghadapinya harus pula mempunyai kewenangan yang extraordinary pula.

Namun akankah komisi ini kembali mandul? Apa yang membuat korupsi itu sangat sulit diberantas di Indonesia, sementara di negara lain, pemberantasan atas korupsi banyak yang sukses? Tanpa menggali akar korupsi di Indonesia, berbagai

aturan dan komisi yang dibuat, sebesar apapun kewenangannya, akan kembali mengulangi pola lama.

Kita dapat melihat kesalahan yang kita lakukan di era reformasi. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan untuk memberantas korupsi, sejak reformasi menumbangkan Orde Baru ditahun 1998?

Sebagai wacana, korupsi sudah menjadi agenda utama reformasi. Hampir semua pimpinan penting secara publik menyatakan keharusan pemberantasan korupsi. Semua menyadari pula bahwa krisis ekonomi dan tumbanganya Orde Baru juga disebabkan oleh korupsi.

Sudah sangat banyak pula aturan yang dibuat dan organisasi yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Di tingkat aturan hukum, mulai dari TAP MPR, undang-undang, sampai kepada Keppres soal korupsi sudah dibuat. Dari sisi organisasi, aneka kelompok atau komisi pengontrol keuangan negara sudah didirikan, seperti KPKPN. Tidak kurang dari itu, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyoroti korupsi berdiri, seperti Gempita GOWA, dan ICW.

Lembaga negara juga sudah dipilih secara demokratis. Benteng paling kuat yang tadinya diharap menjadi pengawal utama reformasi adalah DPR. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1955, DPR kini dipilih secara demokratis. Melengkapi DPR, sudah ada pula kebebasan pers. Berbeda dengan zaman Orde Baru, pers begitu bebas melakukan investigasi dan publikasi bahkan terhadap harta presiden dan keluarganya sekalipun.

Namun apa hasilnya? Kita dapat melihat ukuran yang dibuat oleh lembaga internasional berwibawa: Transparency International. Setiap tahun, lembaga itu melakukan survei atas puluhan negara di dunia. Atas hasil survei, lembaga ini membuat skor korupsi dan tingkatannya.

Ketika Orde Baru tumbang di tahun 1998, angka korupsi kita sudah sangat buruk. Dari 85 negara yang disurvei, Indonesia berada di rangking ke 80. Itu berarti Indonesia berada di rangking 5 terburuk di dunia. Skor korupsi kita adalah 2.0. Sebagai bandingan, skor korupsi Singapura adalah sangat tinggi: 9.1. Semakin kecil skor korupsi semakin buruk korupsi di negara itu.

Yang mengagetkan adalah posisi korupsi kita di tahun 2002, empat tahun setelah reformasi. Dari 102 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke 96. Itu berarti Indonesia berada di urutan keenam terburuk di dunia. Namun jika dibandingkan dengan tahun 1998, skor korupsi kita ternyata bertambah merosot. Nilainya hanya 1.9. Bagaimana mungkin?

Setelah reformasi, korupsi di Indonesia bertambah buruk. Apa gunanya komitmen para pemimpin yang diucapkan secara publik sejak tahun 1998 itu? Apa gunanya berbagai aturan, organisasi dan komisi yang sudah dibuat sejak tahun 1998 untuk mengontrol korupsi? Apa gunanya pers bebas, DPR yang dipilih secara langsung? Apa yang salah jika ternyata hasil dari semua itu justru korupsi bertambah buruk?

Satu hal yang sering dilupakan, setelah secara kelembagaan perang atas korupsi dideklarasikan, semangat penyelenggara negara memegang kunci. Jika semangat penyelenggara negara sangat lembek bahkan tidak peduli dengan koruptor, semua perbaikan kelembagaan itu akan percuma.

Setelah reformasi kita memang menyaksikan begitu lembeknya sikap para penyelenggara untuk memberantas korupsi. Ini terjadi tidak hanya di level legislatif, eksekutif tetapi juga yudikatif. Mereka bukan saja pasif dan tidak berinisiatif atas tindak tanduk korupsi, namun terjebak pada sikap yang melindungi para tersangka korupsi. Dengan semangat seperti

itu, bahkan Komisi Anti Korupsi yang sangat powerful pun tidak akan banyak gunanya.

Lihatlah apa yang terjadi di lembaga legislatif. Pimpinan DPR sendiri sudah diputus oleh pengadilan negeri bersalah atas perkara korupsi. Memang benar, secara hukum, keputusan itu belum berkekuatan tetap. Namun kebijakan publik lebih dari sekedar persoalan legalistic formal. Di situ harus pula ada etika dan inisiatif yang menunjukkan komitmen. Jika DPR sangat kuat dan benar-benar berkomitmen atas korupsi, apalagi dalam rangka menciptakan preseden, maka ada upaya kolektif untuk secara hormat meminta ketua DPR nonaktif.

Lebih daripada sekedar persoalan ketua DPR, kini DPR pun berulang-ulang dilanda isu korupsi. Mulai dari divestasi BCA, kasus BLBI, rapat panitia anggaran, kasus cek perjalanan, percetakan uang, PT Pura dan divestasi bank Niaga, isu korupsi merebak. Tidak ada satupun yang berhasil diinvestigasi dan diberi hukuman oleh DPR sendiri. Korupsi bahkan sudah dilakukan secara gotong royong. Mereka yang mengangkat isu korupsi bahkan dikucilkan oleh partainya sendiri.

Lembaga eksekutif juga mengalami hal yang sama. Ujung tombak pemberantasan korupsi di eksekutif adalah Jaksa Agung. Diperlukan seorang figur yang bersih, jujur dan berwibawa agar publik merasa perang atas korupsi itu sangat serius. Namun apa yang terjadi? KPKPN sudah menunjukkan betapa Jaksa Agung rnemberikan pernyataan yang berubah-ubah atas asal-usul kekayaannya. Ada pula kekayaan yang tidak dilaporkan.

Melihat gelagat itu, apa yang dilakukan presiden selaku atasannya? Bukankah presiden berulang-ulang menyatakan secara publik bahwa ia berkomitmen memberantas korupsi? Publik mengharapkan terjadinya pemecatan Jaksa Agung lebih sebagai preseden dan pembelajaran bagi pejabat publik selanjutnya. Namun presiden justru melindunginya. Dikatakan

bahwa pengganti Jaksa Agung belum tentu lebih baik. Jika hanya masalah laporan kekayaan, jaksa agung dipecat, maka semua menteri dapat terkena pecat pula.

Tentu dapat ditelusuri lebih lanjut mengapa komitmen penyelenggara negara dalam praktek sangat lemah, bahkan cenderung melindungi perilaku korupsi? Konsolidasi politik kelompok dan survival atas kekuasaan lebih dipentingkan daripada pemberantasan korupsi. Karena fragmentasi politik, tidak ada satu kekuatan politik pun yang dominan. Untuk bertahan, sebuah kelompok politik sangat bergantung kepada dukungan kelompok lain.

Karena korupsi terlanjur sudah menyebar ke aneka tokoh di setiap kelompok; karena masing-masing kelompok mempunyai kartu truf mengenai korupsi tokoh di kelompok lain, yang terjadi kemudian adalah mekanisme saling melindungi. Kelompok yang satu berjanji tidak ikut membongkar dan menghukum korupsi tokoh tertentu. Sebagai imbalannya, kelompok dari tokoh yang dilindungi itu pada gilirannya juga melindungi korupsi kelompok yang sudah berjasa. Demikian mata rantai kerja sama saling menutupi praktek korupsi terjadi.

Jika lingkaran saling melindungi ini tidak diputus, Komisi Antikorupsi yang baru saja dibangun hanya menjadi nama. Kita menunggu pimpinan nasional yang berani mengambil resiko politik memutus mata rantai korupsi itu. Namun kapankah pimpinan nasional yang berani itu akan datang. Akankah kita menanti kedatangannya seperti menanti Ratu Adil?

Setelah Kasus Tempo Versus Tomy

AKHIR dari kasus Tempo versus Tomy Winata sudah dapat diduga. Kasus ini akan selesai dengan hanya menghasilkan perubahan sosial yang minor atau hukuman minor atas pelaku yang juga minor.

Mungkin ada hukuman buat pendemo atau “preman” yang terbukti melakukan kekerasan. Mungkin juga ada tindakan administratif atas polisi yang dianggap “takut” pada pendemo. Kesalahan pelaku demo itu, seperti David, dianggap terlalu mencolok untuk dihukum. Aparat kepolisian, yang juga hanya berdiam diri ketika kekerasan dilakukan di kantor polisi, pun dianggap terlalu mencolok jika dibiarkan tanpa hukuman.

Tokoh kelas kakap seperti Tomy Winata akan bebas seperti biasa. Kepala Polda, yang dikabarkan ditelepon melalui telepon genggam oleh “preman”, juga akan tetap bertugas seperti sebelumnya. Gubernur Sutiyoso yang dikabarkan “mendapat

bantuan” dari pendukung Tomy untuk menjadi gubernur, juga tetap menjadi gubernur. Majalah Tempo juga tetap terbit seperti sedia kala.

Kasus Tempo versus Tomy Winata secara bertahap menghilang. Publik kembali disibukkan oleh berita yang lebih baru. Jika perang Amerika Serikat versus Irak meletus, misalnya, segera isu perang itu mengambil alih perhatian publik. Atau publik akan tercuri perhatiannya oleh isu yang lebih baru soal Inul, soal jajak pendapat presiden dan sebagainya.

Demikianlah hasil politik dan hukum yang terjadi jika kita menggunakan prosedur normal di era yang sulit seperti sekarang. Sistem politik dan hukum kita saat ini hanya mampu mengakomodasi perubahan yang minor, terhadap tokoh yang minor pula. Terlalu banyak kepentingan dan konflik baru akan tercipta jika seorang tokoh kelas kakap berubah posisinya menjadi terpidana.

Tokoh kelas kakap hanya bisa dihukum, baik secara politik ataupun melalui pengadilan, dalam situasi yang tidak normal. Misalnya melalui revolusi sehingga kehendak publik luas yang bekerja tanpa rintangan aparat hukum. Atau, melalui rentetan aksi protes publik yang meluas dan lama, seperti dalam perubahan Mei 1998.

Mengapa akhir dari kasus ini, patut diduga gagal “menjaring” Tomy Winata? Mengapa setelah kasus “penyerbuan” Tempo digelar dan dibicarakan di berbagai komunitas, Tommy Winata patut diduga, masih dapat juga bebas? Ada dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama, Tomy Winata memang tidak pernah membuat proposal soal renovasi Pasar Tanah Abang. Tommy tidak pernah pula memerintahkan “penyerbuan” atas kantor majalah Tempo. Proposal itu tidak pernah ada. Aksi demo yang menyerang Tempo sepenuhnya inisiatif para anak buahnya. Tomy

tidak tahu aksi itu, persis seperti yang diakuinya. Sementara itu, tidak ada bukti hukum dan dokumen ataupun saksi yang dapat memperlemah posisinya.

Jika ini terjadi, majalah Tempo berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, Tomy dapat lepas dari tuduhan turut memerintahkan “serbuan” kantor Tempo. Di sisi lain, ia menyerang balik secara hukum majalah Tempo ke pengadilan.

Persoalan menjadi cukup pelik ketika hakim dan pengacara meminta Pemimpin Redaksi Tempo untuk membuka rahasia. Siapa yang sebenarnya “arsitek kontraktor” itu, yang diklaim Tempo memberi informasi soal proposal Tomy merenovasi Pasar Tanah Abang? Kasus Proposal ini menjadi link paling tegas menghubungkan Tomy dengan kebakaran Tanah Abang.

Patut pula diduga bahwa Tempo tidak akan bersedia memberi tahu siapa sumber informasi itu. Dalam sejarah pers Indonesia, HB Yassin pernah berada dalam dakwaan serupa ketika ia diminta untuk menyatakan siapa sebenarnya nama pengarang yang berlingung dengan nama samsaran Kipanji Kusmin. HB Yassin menolak bersuara siapa pengarang cerpen heboh “Langit makin Mendung” itu. HB Yassin memilih dihukum. Tempo dapat melakukan penolakan serupa untuk membangun tradisi melindungi saksi atau pelapor yang bisa membahayakan hidupnya.

Kemungkinan kedua, Tomy Winata memang bersalah secara faktual. Ia atau orangnya memang pernah membuat proposal soal Pasar Tanah Abang. Hal lain, Tomy juga merestui aksi “penyerbuan” kantor majalah Tempo. Mungkin Tomy meyakini bahwa teror dan ancaman dapat efektif untuk mengurangi kontrol dan kritik publik atasnya.

Seandainya pun fakta ini terjadi, Tomy Winata dapat juga tetap bebas. Ini disebabkan keterbatasan pembuktian hukum itu sendiri. Proposal yang dimaksud, seandainya pun dibuktikan

ada, dengan mudah dibantah sebagai palsu atau rekayasa orang lain. Bagaimana membuktikan secara hukum bahwa proposal itu memang milik Tomy.

Seandainya pun tetap dapat dilihat kaitan antara proposal itu dan anak buah Tomy, dengan mudah dibantah bahwa itu sama sekali di luar pengetahuan Tomy. Apalagi, begitu banyak pula anak buahnya yang mau berkorban demi sang taipan yang “dikagumi” ataupun ditakuti.

Hal yang sama terjadi soal demo “penyerbuan kantor majalah Tempo. Bagi koor, para pendemo dapat bersuara bahwa semua “serbuan” ke kantor Tempo itu atas kehendak sendiri. Mereka bahkan minta maaf kepada publik dan Tomy, serta keluarga Tomy, atas kelancangan demonstrasi dan kekerasan itu.

Tomy tetap bebas karena kurangnya bukti hukum, dan kecanggihan organisasi yang bekerja untuknya. Jika aparat keamanan ataupun aparat hukum berdiri netral, Tomy masih dapat bebas. Apalagi jika ada petinggi aparat keamanan dan hukum juga bekerja menyelamatkan Tomy. Jika benar Tomy mempunyai banyak dukungan kalangan pejabat tinggi karena sumbangan dananya, jelas Tomy akan diselamatkan. Sekali Tomy disakiti oleh proses hukum, ia dapat bernyanyi dan membongkar semuanya. Republik bisa gonjang-ganjing.

Hal ini jelas akan dicegah sekerasnya agar tidak terjadi. Apa lagi jika ini dapat dilakukan dengan hanya memutus hubungan Tomy dengan beberapa anak buah yang “bermasalah”. Anak buah itulah yang akan disalahkan. Apalagi mereka dianggap telah “membual” pula soal dana untuk polisi, untuk Sutiyoso, atau “memerintahkannya” Kepala Polda.

Namun, bebasnya Tomy akan tetap membuat publik luas bingung. Tomy bebas karena memang ia tidak bersalah seperti kemungkinan pertama; atau ia sebenarnya bersalah tetapi banyak kendala dan pelindung seperti kemungkinan kedua?

Seperti kasus lainnya mengenai unsolved mystery tokoh kelas kakap, kita pun tidak pernah tahu.

Bagian Ketiga
Seputar Partai dan Aktor Politik

Golkar Setelah Buloggate II

SEBELUM muncul kasus Buloggate II, Golkar berpeluang sangat besar menjadi pemenang Pemilu 2004. Saingan terdekatnya hanyalah PDIP. Dibandingkan dengan partai lain, bahkan dengan PDIP sekalipun, Golkar sudah unggul dalam beberapa hal penting.

Jumlah Gubernur dari Partai Golkar jauh melampaui gubernur dari partai lainnya. Di era otonomi daerah, peran gubernur sangat besar dalam rangka memobilisasi dukungan politik dan mempengaruhi politik di provinsinya masing-masing. Secara organisasi, Golkar juga yang paling siap dan jaringannya paling rapi sampai ke daerah terpencil. Tidak heran, dibandingkan partai lain, sejak Orde Baru, Golkar sudah berkuasa lama sekali. Selama itu pula institusionalisasi Partai Golkar di seluruh wilayah Indonesia dilakukan.

Yang juga tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Politisi yang aktif di Golkar memiliki jam terbang politik lebih

tinggi. Aneka strategi politik, permainan di parlemen, serta pengalaman di pemerintahan sudah terlebih dulu mereka kuasai. Para aktivis utama partai ini sudah memerintah di era Orde Baru, ketika aktivis partai lain masih bermain di level luar pemerintahan, atau hanya menjadi pejabat publik di level kedua pemerintahan saja.

Namun, kasus Buloggate II telah mengubah peta politik secara signifikan. Kasus ini menjadikan Golkar sebagai partai tersangka karena ada dugaan dana non-bujeter Bulog sebesar Rp. 40 miliar masuk ke partai melalui ketua umum dan tokoh penting partai lainnya. Jelaslah, secara hukum, dugaan itu belum terbukti. Sebelum dibuktikan bersalah di pengadilan secara hukum murni, dugaan di atas harus dianggap hanya sebagai gosip dan rumor belaka.

Namun, secara politik, dugaan itu memiliki implikasi yang sangat besar bagi citra partai. Golkar sudah mengalami apa yang disebut dengan *trial by the press*. Ini acap kali terjadi di negara bebas, bahwa sebelum ada pengadilan hukum sudah ada pengadilan oleh pers. Pengadilan pers dapat merusak citra politik secara signifikan. Suka ataupun tidak, ini *real politics*.

Sementara itu, di dunia mana pun yang memiliki elemen kompetisi, apalagi di dunia kompetisi politik, citra memainkan peranan sangat besar. Perusahaan besar, misalnya, menghabiskan anggaran triliun rupiah dalam rangka memelihara dan menumbuhkan citra tertentu bagi produknya. Dunia politik pun, terutama di dunia maju, menghabiskan triliun rupiah dengan cara membeli siaran televisi ataupun membuat iklan untuk mendongkrak citra partai ataupun tokoh tertentu.

Citra politik sangat berkait dengan opini publik. Sedangkan opini publik adalah salah satu sokoguru penting sistem politik demokratis. Lebih dari tiga tahun kita memasuki era reformasi. Sebelum era reformasi, di zaman otoriter era Soeharto, politik

tidak memerlukan opini publik. Bulat dan lonjongnya produk politik dan rekrutmen personel di pemerintahan sepenuhnya tergantung Soeharto.

Namun, era itu sudah berlalu. Di dunia demokrasi yang sekarang sedang ditumbuhkan di Indonesia, publik yang menentukan siapa yang harus menjadi pemerintah melalui pemilu. Partai yang tidak memperhatikan opini publik tidak akan pernah berkuasa. Menarik untuk mengeksplorasi apa yang paling menentukan citra partai berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dalam politik opini publik. Tentu ada perbedaan antara dunia maju dan negara demokrasi baru soal opini publik dalam hubungannya dengan citra partai.

Di dunia maju, seperti di Amerika Serikat, opini publik terhadap partai sangat ditentukan oleh platform partai. Mengapa seseorang memilih partai tertentu atau tokoh dari partai tertentu, banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan ideologi partai itu. Di Amerika Serikat, misalnya, 40 persen dari populasi pemilih adalah pemilih loyal dari Partai Demokrat karena kebijakan dan orientasi partai.

Sebesar 40 persen dari populasi pemilih juga merupakan pemilih loyal Partai Republik karena juga platform Partai Republik. Siapa pun yang menjadi kandidat partai (baik dari Partai Demokrasi ataupun Partai Republik), umumnya sudah pasti masing-masing mengantongi 40 persen. Sisa 20 persen lainnya ditentukan oleh kualifikasi sang calon sendiri.

Di Indonesia, sebagai negara demokrasi baru, keadaannya berbeda. Mengapa seseorang memilih partai tertentu belum ditentukan oleh platform partai itu. Citra partai masih sangat ditentukan oleh tokoh utamanya, terutama ketua umumnya. R. William Liddle dan Saiful Mujani melakukan penelitian yang intensif mengenai alasan pemilih untuk memilih partai tertentu dalam pemilu di Indonesia 1999. Sebesar 60-90 persen alasan memilih partai tertentu karena ketua umumnya atau tokoh-

tokoh utamanya. Mereka memilih PDIP karena Megawati, memilih PKB karena Gus Dur, memilih Golkar karena Habibie, memilih PAN karena Amien Rais dan lain sebagainya.

Bagi Golkar masa kini, karena figur Habibie tidak lagi bertarung dalam politik, citra ketua umumnya, Akbar Tandjung yang paling menentukan apakah seseorang akan memilih Golkar atau tidak dalam Pemilu 2004. Namun setelah kasus Buloggate II, citra Akbar Tandjung kini menjadi sasaran politik yang sangat empuk bagi lawannya tidak hanya di partai lain, tetapi juga di partainya sendiri.

Tokoh Golkar seperti Muchyar Yara dan Baramuli acap kali menyuarakan argumen yang semakin memojokkan Akbar Tandjung. Demi kepentingan partai, ujar mereka, Golkar harus memiliki ketua umum baru. Menurut Muchyar, terlalu riskan mempertahankan Akbar Tandjung. Selalu ada kemungkinan Akbar dinyatakan bersalah di pengadilan jika kasus ini sampai ke pengadilan. Berdasarkan tahapan pengadilan, kekuatan hukum tetap atas Akbar Tandjung boleh jadi hanya beberapa bulan saja sebelum Pemilu 2004. Jika Akbar Tandjung dinyatakan bersalah saat itu, mengganti ketua umum sudah sangat terlambat.

Sementara itu pendukung Akbar Tandjung juga tidak kalah banyaknya. Bagi mereka, Akbar Tandjung masih bisa diselamatkan. Apalagi, menurut mereka, tidak ada lagi calon lain sebagai alternatif pengganti Akbar Tandjung yang lebih dapat diterima oleh khalayak politik luas di era reformasi. Dengan sedikit manuver, mereka masih berkeyakinan bahwa pada akhirnya Akbar Tandjung kembali lolos dari lubang jarum.

Setelah kasus Buloggate II, Golkar kini berada dalam kesulitan serius. Justru karena kecintaan kepada kejayaan partai, para aktivis utama Golkar memang harus memutuskan untuk maju dalam Pemilu 2004, dengan atau tanpa Akbar Tandjung selaku ketua umum.

Ada baiknya Golkar kembali memperhatikan opini publik, misalnya buatlah survei dengan sampel terbatas untuk mengetahui apakah publik lebih cenderung memilih Golkar jika Akbar Tandjung masih ketua umum, atau justru jika Golkar dipimpin oleh tokoh lainnya.

Pengadilan Politik Akbar Tandjung?

INILAH kenyataan pahit yang dihadapi Akbar Tandjung, baik sebagai politisi secara individual maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR Republik Indonesia. Akbar mungkin lolos dari jeratan pengadilan hukum, tetapi ia tetap tersandung dan dijatuhkan oleh pengadilan politik. Seiring dengan penahanannya di Kejaksaan Agung dan semakin terbongkarnya aneka skenario kebohongan publik di seputar kasus Bulog II, Akbar menghadapi pengadilan politik yang memiliki hukum besinya sendiri.

Panggung politik nasional mungkin harus bersiap-siap kehilangan Akbar Tandjung sebagai salah satu pemain andalnya. Akbar mungkin masih memimpin Golkar ataupun sudah lengser. Akbar juga mungkin masih memimpin DPR ataupun sudah nonaktif. Akbar mungkin masih pula aktif dalam politik praktis, tetapi ia sudah “mati” karena pengadilan politik.

Setiap negara nasional, dalam sistem politik apapun, memiliki dua jenis pengadilan. Pertama, pengadilan hukum. Kedua, pengadilan politik. Pengadilan hukum berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan alat bukti yang legal dan formal. Pelaku utama pengadilan hukum adalah aparat hukum dan keamanan. Sedangkan pengadilan politik bersandar pada kecerdasan kolektif dan common sense masyarakat. Pelaku utama pengadilan politik adalah pers dan para pembentuk opini.

Di negara otoriter, baik pengadilan hukum ataupun pengadilan politik dapat dikendalikan oleh penguasa. Dengan mudah penguasa menentukan ke mana arah keputusan hakim kelak karena penguasa yang menentukan “hidup dan matinya” para hakim. Sementara itu pengadilan politik juga sudah diarahkan penguasa. Tidak ada pers yang bebas karena semua saluran informasi dikendalikan penguasa. Pembentuk opini juga tidak dapat bebas bersuara karena penguasa punya penjara untuk membungkamnya.

Sebaliknya, di negara demokrasi yang sudah matang, baik pengadilan hukum ataupun pengadilan politik dapat berjalan sebebaskan-bebasnya. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat ataupun Eropa, penguasa tidak dapat mendikte hakim dan pengadilan. Aparat hukum ini menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa murni bersandar pada argumen dan barang bukti formal di pengadilan. Memang, tidak semua yang benar-benar bersalah ditahan. Namun, lolosnya pihak yang bersalah bukan karena intervensi politik penguasa, tetapi oleh tidak memadainya alat bukti formal.

Di negara demokrasi modern, pengadilan politik juga berjalan tanpa didikte oleh penguasa. Pers berjalan dengan bebasnya, dengan kebebasan melakukan investigasi dan mempublikasikan hasil temuannya. Semakin kontroversial dan sensasional hasil investigasi itu, semakin pers yang bersangkutan mendapatkan

kredit, sejauh beritanya akurat. Para pembentuk opini tidak pula dapat diberangus oleh pihak penguasa.

Di negara yang sedang dalam transisi menuju demokrasi di Indonesia, situasi pengadilannya berada dalam posisi tengah. Pengadilan hukum masih bisa diintervensi oleh penguasa melalui aneka kompromi politik. Jika seorang tokoh politik berpengaruh ditahan, selalu mungkin hasil akhirnya tidak ditentukan oleh bukti di pengadilan, tetapi oleh kesepakatan elite yang berpengaruh. Itulah sebabnya Akbar Tandjung selalu mungkin lolos dari pengadilan hukum, baik ia benar-benar bersalah, apalagi jika tidak bersalah.

Namun, berbeda dengan negara otoriter, kesepakatan elite tetap tidak dapat mempengaruhi pengadilan politik oleh masyarakat. Pers di Indonesia sekarang sudah begitu bebas dan banyak. Satu atau dua dari lembaga pers ini mungkin masih “dibeli” oleh yang berkuasa. Namun mayoritas pers, apalagi yang sudah teruji independensinya, justru ingin mendapatkan pujian dengan cara menampilkan kasus Buloggate II setelanjang mungkin.

Para pembentuk opini juga tidak dapat dibungkam oleh penguasa. Sebagian dari pembentuk mungkin berpihak. Namun, karena begitu banyaknya pembentuk opini dan begitu beragamnya kepentingan para pembentuk opini itu sendiri, agregasi akhir dari pandangan opinion leaders itu akan memihak kepada apa yang benar. Para pembentuk opini juga berlomba-lomba mengungkapkan apa yang benar karena kredibilitas dan masa depan karier mereka tergantung dari kesetiaan atas prinsip baku jurnalisme profesional.

Itu yang menyebabkan mengapa Akbar Tandjung sulit untuk lolos dari pengadilan politik oleh publik. Sungguhpun ada kesepakatan elite untuk melindungi Akbar Tandjung sulit untuk lolos dari pengadilan politik oleh publik. Sungguhpun

ada kesepakatan elite untuk melindungi Akbar, demi stabilitas politik, pengadilan politik atas Akbar memiliki logika sendiri.

Alibi politik Akbar Tandjung sangat berat dan terlalu tidak masuk akal jika diukur dari standar kecerdasan kolektif. Terlalu banyak kelemahan skenario yang dijalankan oleh pihak Akbar selama ini untuk menutupi kisah rnengalirnya uang empat puluh miliar rupiah.

Penunjukkan Yayasan Raudatul Jannah atas dana Rp. 40 miliar itu sudah tidak masuk akal sejak awal. Tidak ada tender. Apalagi, yayasan itu tidak memiliki rekor sebagai penyalur sembako. Kondisi kantor yayasan yang sedemikian tidak terawat mustahil pula membuat publik percaya bahwa yayasan ini menyalurkan dana sebanyak itu. Apalagi Jaksa Agung sudah pula melakukan investigasi dan tidak menemukan adanya bukti pembagian sembako.

Lebih parah lagi, skenario ini menyatakan bahwa uang sebanyak itu diambil dari bank oleh pihak yayasan dengan menggunakan KTP palsu. Akibatnya siapa yang mencairkan uang tidak dapat dilacak. Jelas pula ini penghinaan berikutnya kepada kecerdasan publik. Jika benar yayasan itu adalah penyalur yang baik, mengapa harus menggunakan KTP palsu? Mengapa pula bank-bank besar dapat meloloskan pencairan dana yang begitu besar tanpa check dan recheck.

Puncak dari kelemahan skenario itu ketika mengalihkan beban kepada seorang sopir taksi yang lugu, yang sudah wafat, bernama Dadi. Dinyatakan bahwa Dadi yang bertanggung jawab atas proyek Rp. 40 miliar itu. Sampai di sini, bukan kecerdasan publik yang dipertanyakan tetapi moralitas umum. Bagaimana mungkin para politikus begitu tega mengorbankan orang yang sudah wafat. Aneka stasiun televisi menunjukkan ibunda Dadi yang sangat sederhana, menjerit hatinya, karena sang anak dapat menjadi “tersangka in absentia”.

Begitu yakin para politisi dan para tersangka bahwa dana Rp 40 miliar itu sudah disalurkan semestinya. Namun, ketika Akbar Tandjung ditahan, muncul lagi skenario baru. Ternyata sebagian uang itu diakui belum disalurkan. Winfried Simatupang dan Dadang Sukandar mengembalikan dana sebesar Rp. 32,5 miliar. Dana itu diakui bagian dari Rp. 40 miliar yang belum disalurkan. Berarti para tersangka sudah menolak keterangan mereka sendiri sebelumnya. Begitu mudahnya mereka membolak-balik kebohongan.

Jika sebuah skenario yang penuh kebohongan publik dibantah yang sebenar-benarnya, publik dapat menerima skenario itu sebagai tanda pertobatan. Namun jika skenario kebohongan digantikan oleh skenario kebohongan baru yang semakin canggih, maka pengadilan politik akan terus berlanjut. Bahkan pengadilan politik itu akan lebih kejam dan menyeret tokoh-tokoh baru.

Sangatlah sayang jika di era kebebasan seperti ini masih banyak politisi yang meremehkan kecerdasan publik. Sangatlah sayang pula, politisi sekaliber Akbar Tandjung yang dikenal santun, setia kawan, tenang emosi, harus menjadi korban karena dipaksa oleh lingkungannya atau oleh dirinya sendiri, masuk ke dalam jaringan kebohongan publik itu. Ini yang menjadi sebab mengapa sulit bagi Akbar untuk lolos dari pengadilan politik.

Golkar masih penuh dengan para politisi yang idealis. Kita harap mereka menyelamatkan Golkar dari “orang-orang lama” yang lupa bahwa di era reformasi, kecerdasan publik tidak boleh diremehkan.

Rapuhnya Aliansi Partai

BELAKANGAN ini, pertemuan antar tokoh partai yang berbasis komunitas Islam semakin intensif. Mereka yang hadir dalam pertemuan, antara lain, para tokoh yang berasal dari PPP, PAN, PBB dan PK. Dari komposisi partai yang berkumpul, dengan cepat publik kembali teringat kepada Poros Tengah. Istilah ini merujuk kepada sebuah koalisi longgar di tahun 1999, yang bersama Golkar dan PKB, berhasil mendudukkan calonnya menjadi Ketua MPR, Presiden dan Ketua DPR.

Kini, para tokoh yang bertemu berbeda pandangan apakah mereka akan kembali menghidupkan sejenis Poros Tengah Jilid dua. Namun mereka memberikan argumen yang sama, bahwa memang ada pertemuan dengan target yang semakin jelas. Mereka peduli dengan nasib amandemen UUD 45. Agustus 2002 ini menjadi batas waktu amandemen. Dengan begitu derasnya pihak yang menentang amandemen, mereka merasa perlu berkumpul secara informal, di luar gedung MPR/DPR, untuk menghindari kemungkinan deadlock.

Pertemuan tokoh partai ini melihatkan pola aliansi partai yang menarik. Sekali lagi, aliansi ini merangkul PKB. Karena PKB terpecah dua, yang dirangkul adalah PKB versi Alwi Shihab, yang punya mayoritas suara di DPR/MPR, bukan PKB versi Matori. Sekali lagi pula, aliansi ini mengambil jarak dengan PDIP. Dikesankan selama ini pihak PDIP yang sulit menerima amandemen radikal atas UUD 45. Bahkan tokoh yang menginginkan amandemen dihentikan, banyak yang berasal dari PDIP

Di luar dari isu politik yang dikemukakan, aliansi partai ini sudah menjadi sebuah isu politik tersendiri. Jika aliansi partai diletakan dalam konteks waktu paska reformasi, akan tampak pola yang agak liar. Tahun 1999, Poros Tengah pernah merangkul PKB dan melawan PDIP. Akibatnya, yang menjadi presiden bukan dari PDIP tetapi dari PKB. Padahal PDIP adalah pemenang pemilu 1999 dengan perolehan suara terbesar.

Namun tahun 2001, dua tahun kemudian, Poros Tengah merangkul PDIP melawan PKB. Akibatnya, Presiden Gus Dur dari PKB jatuh. Dan Megawati dari PDIP naik menjadi presiden. Kini aliansi berubah lagi. Pola yang semakin tampak, Poros Tengah kembali merangkul PKB (versi Alwi Shihab) dan berhadapan kembali dengan PDIP.

Memang perubahan aliansi partai politik menjadi hal yang lumrah dalam demokrasi. Namun jika aliansi itu terpecah dan berubah dalam waktu yang cepat, politik menjadi tidak stabil. Siapapun yang menjadi presiden, ia akan mudah sekali terisolasi karena peta aliansi partai sudah berubah. Dengan aliansi partai yang sedemikian rapuh, dapat dipastikan politik di negara ini tidak akan menciptakan ruang yang kondusif untuk keluar dari krisis. Kerapuhan aliansi partai akibat berubah terlalu cepat pada gilirannya akan menghambat pelebagaan politik.

Menarik untuk ditelusuri. Mengapa di Indonesia paska reformasi, aliansi antar partai politik ini sangat rapuh, dan

mudah sekali berubah dalam waktu yang cepat. Berdasarkan studi perbandingan, kerapuhan aliansi partai dapat terjadi karena gabungan kondisi berikut.

Pertama, sistem kepartaian di negara itu menganut multi partai bukan dua partai. Dalam sistem multi partai, gabungan dua partai terbesar tidak mencapai angka mayoritas kursi di parlemen. Akibatnya, aliansi partai politik menjadi prasyarat penting terbentuknya pemerintahan mayoritas. Sementara dalam sistem dua partai, aliansi partai politik tidak dibutuhkan.

Namun tidak semua aliansi partai dalam sistem multi partai itu rapuh. Maka ada variabel kedua: fragmentasi politik di negara itu terjadi secara luas. Spektrum politik terlalu kaya dan kompleks. Partai dibedakan tidak hanya oleh programnya, namun juga oleh identitas primordial. Karena kayanya spektrum politik, ada kesulitan yang permanen mencari basis aliansi partai politik yang kokoh. Partai terlalu beragam untuk disatukan dalam satu tata nilai yang disepakati dan dihayati bersama.

Ketiga, dalam situasi seperti ini, para elit partai tidak mengembangkan platform partai yang jelas untuk dijadikan basis aliansi yang kokoh. Akibatnya, aliansi partai politik dibuat berdasarkan respon sesaat dan kepentingan jangka pendek. Jika kepentingan itu sudah tercapai, aliansi akan longgar dan pada saat yang cepat dapat pecah kembali.

Pola aliansi di Indonesia setelah reformasi lebih terbentuk oleh kekecewaan pada tokoh dengan target kursi kekuasaan. Acapkali aliansi itu terbentuk untuk menaikan atau menjatuhkan presiden. Setelah presiden yang dicalonkan terpilih, aliansi kembali pecah. Lebih dari itu, terbentuk lagi aliansi baru untuk menjatuhkan presiden yang dipilihnya sendiri. Aliansi partai yang pertama, berhasil menghalangi Megawati dan menaikan Gus Dur. Lalu aliansi pecah dan muncul aliansi baru untuk menjatuhkan Gus Dur. Setelah Megawati naik, kini ada

kemungkinan terbentuk kembali aliansi partai yang berposisi atas Megawati.

Penyebab keempat adalah berkembangnya kultur pragmatisme politik yang terlalu liar. Partai terkesan tidak digerakan oleh prinsip politik yang lebih tinggi, ketimbang jabatan politik. Di tahun 1999, misalnya, PPP begitu gencar meneriakkan anti presiden perempuan. Namun dua tahun kemudian, prinsip itu ternyata semu belaka. Ketua Umum PPP ternyata bersedia menjadi wakil presiden dari presiden perempuan yang dulu dikecamnya sendiri.

Sikap fleksibel dan pragmatisme dalam politik adalah hal yang normal. Namun tetap saja harus ada prinsip politik, sejenis ideologi atau core philosophy yang harus dimiliki sebuah partai. Jika tidak, partai yang bersangkutan akan sulit berkorban demi sebuah komitmen nilai yang lebih tinggi. Padahal aliansi yang kokoh kadang-kadang butuh pengorbanan partai yang bersangkutan demi tercapainya cita-cita politik bersama. Partai yang bersangkutan mesti pula memperlihatkan adanya konsistensi antar apa yang secara publik dinyatakan dengan perilaku politik kongkretnya.

Kombinasi empat penyebab di atas yang menyebabkan aliansi partai politik di Indonesia terkesan tidak dikerjakan untuk mematangkan pelembagan politik. Padahal era transisi membutuhkan aliansi partai yang kokoh. Para elit partai kini ditantang untuk melakukan inovasi politik agar aliansi partai politik terjadi untuk waktu yang lebih lama, setidaknya satu putaran pemilu. Jika tidak, politik hanya menjadi panggung hiburan dimana para tokoh partai dapat berjumpalitan kian kemari selayaknya pemain sirkus.

Tragedi Politik Gus Dur

TOKOH politik besar dalam sejarah punya kecenderungan yang sama. Umumnya mereka menghabiskan masa hidup sebagai politisi praktis, menjadi presiden atau perdana menteri. Lalu, di masa tua, mereka berkembang menjadi negarawan.

Sebagai negarawan, pandangan politik mereka terus memperkaya dan memperdalam kualitas politik di negaranya masing-masing. Demikianlah yang terjadi pada Winston Churchill, Thomas Jefferson, ataupun Nehru, sekadar untuk memberi contoh. Semakin hari kawan ataupun lawan politik serta publik luas semakin respek kepadanya.

Sangatlah disayangkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) justru menempuh jalan yang sebaliknya. Semakin hari, Gus Dur bukannya semakin dihormati oleh publik, tetapi semakin dicerca dan diabaikan. Sebuah tragedi politik, jika Gus Dur dulu tumbuh sebagai solusi, dan kini justru berkembang menjadi sebuah problem. Perjalanan politik niscaya harus menjadi perenungan mendalam.

Kekhawatiran ini seketika muncul mendengar pernyataannya yang mutakhir. Sengaja ia menggelar konferensi pers dan menuduh pengurus Nahdatul Ulama (NU) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima uang pelicin Rp. 3 Miliar agar ia bersalaman dengan Megawati. Saefullah Yusuf dan Hasyim Muzadi sudah membantah tuduhan Gus Dur. Bahkan Muzadi selaku Ketua Umum PBNU dengan berseloroh mengatakan bahwa tarif bersalaman dengan Gus Dur belum semahal itu. Itu untuk kesekian kalinya Gus Dur melemparkan pernyataan yang kontroversial.

Publik sulit membayangkan apa yang ada dibenak Gus Dur. Mengupayakan agar Gus Dur bersalaman dengan Megawati jelaslah sangat berbeda dengan mempertemukan Gus Dur dengan Tommy Soeharto tempo hari. Saat bertemu Tommy, Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia. Sementara Tommy adalah tertuduh yang sedang meminta grasi kepada Presiden Republik Indonesia. Kekhawatiran akan adanya kongkalikong untuk menelungki hukum menjadi besar. Pertemuan itu sendiri sudah membuka ruang untuk fitnah, walau sebenarnya misalnya tidak ada deal-deal tertentu.

Namun, pertemuan Gus Dur dengan Megawati berada pada tataran yang lain. Publik ingin melihat terjadinya rekonsiliasi antara pemimpin politik yang masih bersitegang. Masalah politik, ekonomi dan hukum di Indonesia sudah sedemikian beratnya. Masalah itu tidak perlu ditambah lagi dengan konflik antar pemimpin yang punya pengaruh besar. Bertemuinya kembali Gus Dur dengan Megawati atau M. Amien Rais atau tokoh mana saja dapat menjadi awal yang baik.

Apa yang terjadi pada Gus Dur? Mengapa kualitas kepemimpinannya terus merosot? Mengapa komunitas politiknya semakin sempit, dan kini bahkan ia dibantah oleh basisnya sendiri di PKB dan NU. Banyak analisis dapat dikemukakan. Namun yang terpenting, kita khawatir melorotnya Gus Dur disebabkan oleh kisis pendukung.

Tidak hanya pemimpin yang mengalami krisis, pendukung juga dapat mengalami krisis. Pendukung mengalami krisis jika mereka tidak lagi mengembangkan budaya kritis kepada pemimpinnya. Akibatnya, sang pemimpin semakin kehilangan sentuhan dengan kenyataan dan komitmennya pada moral dasar, juga memudar demi survival kekuasaan.

Pendukung dapat “membunuh” pemimpinnya dengan sikap asal bapak senang (ABS) atau asal ibu senang (AIS). Mendukung hanya dipahami sebagai menjalankan saja apa bapak penguasa atau ibu presiden minta. Demikianlah para presiden Indonesia dari Soekarno sampai Gus Dur, semuanya terjungkal satu demi satu karena tidak mendapatkan feed back yang kritis dari pendukungnya. Bahkan Presiden Megawati dapat mengalami nasib sial yang sama jika para pendukungnya hanya mengembangkan kesetiaan buta, tanpa berani mengkritik dan melawan demi kebenaran dan keadilan.

Krisis pendukung di sekitar Gus Dur dapat lebih parah lagi karena ia seorang kiai besar. Di kalangan NU, Gus Dur berdarah biru, bahkan oleh sebagian orang dianggap wali. Aneka tindakan “direken” salah oleh publik melalui common sense dapat dianggap benar oleh pendukung setianya karena menganggap Gus Dur seperti Nabi Khaidir yang menyatakan kebenaran dengan cara yang tidak biasa.

Publik masih ingat ketika Gus Dur tengah diserang skandal Bulog I dan Bruneigate, datang begitu banyak pendukungnya yang terkesan pengikut setia Islam. Sang pendukung itu bahkan mengatakan, di dada Gus Dur ada seratus malaikat. Bagaimana Gus Dur dapat disalahkan jika ia dijaga dan dibimbing oleh begitu banyak malaikat. Dengan iklim pendukung seperti itu, Gus Dur semakin hidup di dunia khayalannya sendiri.

Padahal, di masa silam, publik sempat menganggapnya sebagai guru bangsa. Pandangan politiknya saat itu terasa visioner, inisiatif dan mencerahkan. Di saat Presiden Soeharto

di puncak kekuasaan, Gus Dur menjadi alternatif dengan Forum Demokrasinya. Begitu banyak tokoh kritis berharap kepada Gus Dur dan melihat keluwesannya berhubungan hampir dengan semua segmen penting masyarakat.

Ia dapat memberi wejangan yang memukau rakyat pedesaan di sebuah pesantren NU. Pada saat yang sama ia juga mampu meyakinkan kalangan intelektual terbaik di kota besar. Kemampuan humor yang dimiliki sangat mampu mencairkan dan menghangatkan forum politik. Tidak hanya intelektual Jakarta yang dapat dibuatnya terpingkal-pingkal, bahkan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pun (waktu itu) dapat “kesirap”

Ketika menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama terpilih secara demokratis, harapan publik melambung tinggi. Mayoritas membayangkan bahwa kita akhirnya kembali punya seorang presiden yang sangat intelek dan berkomitmen pada demokrasi dan pluralisme. Namun harapan itu tidak berumur lama. Semakin berkuasa, pribadi Gus Dur bukannya semakin besar dan arif. Sebaliknya, kekuasaan membuatnya semakin kerdil dan kontroversial.

Melorotnya kredibilitas politik Gus Dur niscaya harus membuat kita merenungkan kembali soal krisis pendukung. Jika kultur pendukung itu tidak dibenahi, niscaya yang akan menjadi korban adalah para presiden berikutnya dan tokoh politik penting lain.

Pendukung yang benar, yang sungguh-sungguh mencintai pemimpinnya adalah pendukung yang tidak ingin pemimpinnya berbuat salah. Tidak semua keinginan pemimpin dituruti. Jika menentang akal sehat, pendukung justru harus mengkritik dan membangkang atas keinginan pemimpin. Betapa rugi seorang pemimpin jika ia hanya dikelilingi oleh pendukung yang tidak lagi kritis dan tidak lagi berani membangkang.

Calon Presiden dan Wapres 2004

SUNGGUHPUN pemilihan presiden dan wapres 2004 masih lama, namun perdebatan mengenai siapa calon yang layak tampil dan mungkin terpilih mulai menghangat. Walau tidak dinyatakan secara eksplisit, beberapa metode sudah digunakan untuk memiliki pasangan calon presiden dan wapres 2004 yang ideal.

Kita evaluasi kelemahan aneka metode itu, sekaligus menawarkan metode lain. Dengan metode baru ini kemenangan pasangan presiden dan wapres 2004 lebih dapat dipastikan. Namun yang lebih penting lagi, metode itu lebih menjamin stabilitas politik, di era demokrasi yang sangat goyah seperti di Indonesia saat ini.

Metode lama yang paling populer dan terkesan ilmiah adalah jajak pendapat. Baru-baru ini, sebuah lembaga penelitian mempublikasikan hasilnya. Ternyata pasangan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudoyono adalah pasangan presiden dan wapres paling populer untuk tahun 2004.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa pasangan ini mengungguli semua kemungkinan komposisi lain. Pasangan ini tetap lebih unggul dibandingkan pasangan Megawati-Amien Rais. Megawati-Hamzah Haz, ataupun Amien Rais-Yusril. Pasangan Megawati-Yusuf Kalla, yang kini juga sedang ditawarkan, tidak termasuk dalam pasangan populer versi jajak pendapat.

Berbagai justifikasi kemudian diberikan mengapa Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono dianggap paling populer, melebihi lainnya. Segmen pemilih di Indonesia dianggap masih kental dengan nuansa tokoh kharismatik. Untuk kategori ini, Megawati tetap tidak terkalahkan sebagai calon presiden.

Sementara sebagai pasangannya yang ideal, seorang purnawirawan militer yang intelektual, seperti SBY, dianggap paling layak. Calon wapres ini dapat mengisi kekosongan Megawati dalam artikulasi intelektual. Karena dari latar belakang militer, ia juga lebih fokus dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di era pancaroba seperti sekarang.

Ada dua kelemahan mendasar dalam metode jajak pendapat di atas. Di satu sisi, jajak pendapat di Indonesia acapkali cacat secara metodologi. Sampel yang diambil untuk jajak pendapat itu sangat bias, dan tidak mewakili populasi Indonesia yang plural. Untuk jajak pendapat di atas, yang menjadi sampelnya hanyalah beberapa kota besar, dengan responden mayoritas pendidikan SMU ke atas.

Padahal jumlah kota besar hanyalah minoritas dari wilayah pemukiman yang sesungguhnya akan memilih presiden dan wapres 2004. Sementara jauh lebih banyak segmen pemilih pendidikan SMU ke bawah dibandingkan SMU ke atas. Seandainya pun dalam elemen lain metodologi jajak pendapat itu benar, pemilihan sampel yang bias itu tidak dapat diklaim mewakili populasi Indonesia. Dengan sampel yang berbeda, hasilnya pun dapat berbeda.

Kelemahan lain jajak pendapat itu adalah labilnya opini publik. Siapa yang populer akan dipengaruhi oleh mobilisasi dan pencitraan tokoh tertentu. Ketika jajak pendapat dilakukan, kampanye belum dimulai. Partai besar sebagai mesin kampanye paling efektif, termasuk iklan di televisi, juga belum dilakukan. Setelah musim kampanye tiba, apalagi kampanye negatif, dan setelah partai bergerak sebagai mesin pembentuk citra, siapa yang populer di mata publik sangat mungkin berubah.

Metode lama lain yang juga populer, yang acapkali dilakukan, adalah kutak katik komposisi individual. Karena calon presiden dari Jawa, maka wapres sebaiknya tidak dari Jawa. Karena calon presiden dari partai terbesar pertama, sebaiknya wapres sebaiknya dari partai terbesar kedua. Karena calon presiden bertipe solidarity maker dan simbolik, maka wapres sebaiknya bertipe administrator dan entrepreneur. Karena wakil presiden dari basis nasionalis, maka wapres sebaiknya berasal dari komunitas yang cukup kental keislamannya.

Yang mulai dibicarakan menggunakan metode ini adalah pasangan Megawati dengan Yusuf Kalla. Jika Megawati ditetapkan sebagai calon presiden, maka dengan kriteria di atas, Yusuf Kalla dianggap yang paling potensial mendampinginya. Dengan metode seperti ini, Susilo Bambang Yudoyono tidak lagi menjadi calon pasangan wapres Megawati yang ideal.

Landasan bagi terbentuknya duet Megawati-Yusuf Kalla cukup kuat. Namun landasan itu dengan mudah dapat dirontokan oleh prasyarat calon presiden dan wapres yang sedang disusun dalam RUU Pemilu atau RUU Presiden. Aturan main dalam RUU itu sangat menentukan apakah pasangan Megawati dan Yusuf Kalla relevan dan responsif atas RUU tersebut.

RUU itu sedang menjajaki beberapa kemungkinan. Diantaranya, calon presiden hanya datang dari dua partai terbesar berdasarkan hasil pemilu DPR 2004. Pemilihan

presiden dilaksanakan setelah pemilihan DPR. Dengan metode ini, pemilihan presiden cukup satu putaran saja. Kemungkinan lain yang dijajaki, calon presiden berasal dari partai yang minimal memperoleh suara lebih dari 20% dalam pemilu DPR 2004.

Jika komposisi partai dalam DPR 2004 menyerupai DPR 1999, maka hanya PDIP dan Golkar yang berhak mempunyai calon presiden. Dengan konstruksi ini, mustahil bagi Yusuf Kalla yang berasal dari Golkar secara ideal mendampingi Megawati yang dari PDIP. Calon presiden dari PDIP dan Golkar akan bersaing. Tentu masing-masing partai akan mencari calon wapres dari basis komunitas di luar partai yang saling bersaing. Maka yang akan direbut menjadi calon wapres adalah tokoh populer dari Islam, baik dari NU, Muhammadiyah, atau dari Indonesia timur.

Metode baru yang kita tawarkan untuk mencari pasangan presiden dan wapres adalah kesepakatan partai melalui konfederasi. Tanpa memperdulikan jajak pendapat yang dapat dipersoalkan metodologinya, dan tanpa melihat RUU Pemilu/Presiden, tiga partai dapat berkonfederasi untuk mempunyai pasangan presiden dan wapres bersama. Misalnya, PDIP-Golkar dan PKB, sepakat untuk berhimpun dalam sebuah konfederasi, untuk bersama-sama menyusun pemerintahan paska 2004.

Tiga partai ini membuat kesepakatan, partai manapun yang menjadi pemenang pertama di antara ketiga partai ini dalam pemilu DPR 2004, akan diberikan hak mencalonkan presiden. Sedangkan pemenang kedua, diberikan hak mencalonkan wakil presiden. Dan pemenang ketiga, di antara tiga partai itu akan memperoleh beberapa pos kementerian. Di samping soal eksekutif, ketiga partai itu dapat juga sepakat mengenai power sharing posisi lain, mulai dari ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, dan gubernur di berbagai propinsi.

Hampir dapat dipastikan konfederasi tiga partai di atas akan memperoleh suara mayoritas di DPR 2004. Tiga partai di

atas juga merupakan kombinasi dua segmen politik terbesar di Indonesia, komunitas nasionalis dan Islam. Tiga partai itu dapat menjadi mesin kampanye yang efektif bagi calon presiden dan wapres 2004 yang mereka dukung bersama.

Politik Indonesia akan lebih stabil karena konfederasi tiga partai ini akan mendominasi politik Indonesia paling kurang selama 25 tahun. Selama itu pula, presiden dan wapres akan terus menerus berasal dari konfederasi tiga partai itu, kecuali jika mereka membuat kesalahan yang fatal.

Dilema Partai Golkar?

PDIP punya satu Megawati, tetapi Golkar punya seribu Akbar Tandjung. Demikianlah opini populer yang membandingkan posisi ketua umum PDIP dan Golkar terhadap partainya masing-masing.

Sangat sulit mengganti posisi ketua umum PDIP karena ketergantungan partai kepada figur khas Megawati. Namun di Golkar, partai tidak lagi bergantung kepada figur ketua umum. Golkar adalah partai yang paling rasional dan sudah terlembaga. Sumber daya manusianya sangat kaya. Pergantian ketua umumnya, dari satu tokoh rasional ke tokoh rasional lainnya, dapat menjadi masalah rutin yang tidak menghebohkan partai.

Tetapi mengapa Golkar tetap mempertahankan Akbar Tandjung selaku ketua umum (dan juga ketua DPR)? Padahal, bukankah vonis pengadilan tiga tahun, walau belum mempunyai hukum tetap, sudah mengubah posisi pribadi Akbar Tandjung terhadap Golkar dari asset menjadi beban? Inilah yang banyak menjadi bahan diskusi publik.

Kasus Buloggate 2, seketika menghancurkan citra Akbar Tandjung. Di era kebebasan seperti sekarang, Akbar Tandjung menjadi sasaran empuk bagi kritik pers. Apapun yang menyangkut Akbar Tandjung kini menjadi berita yang sensasional dan seksi.

Akbar Tandjung sudah dipersepsikan sebagai orang kuat yang bersalah, namun masih berkuasa. Jika ia menjadi ketua umum sebuah partai yang baru, ia sudah akan menjadi sasaran empuk. Apalagi, Akbar Tandjung memimpin Golkar, sebuah partai yang keberadaannya selalu dikaitkan dengan rezim Orde Baru.

Golkar sebagai partai menghadapi dilema yang berat untuk menyikapi Akbar Tandjung. Dalam sejarahnya, sebagai partai, Golkar memang sudah diuji oleh masalah yang lebih berat. Namun semua masalah sebelumnya adalah kasus Golkar sebagai partai berhadap-hadapan dengan pihak di luar Golkar.

Memang untuk semua kasus itu, Golkar masih survive dan mampu mengatasinya. Sebut saja kasus lahirnya gerakan reformasi yang ingin menjatuhkan Soeharto, sekaligus membubarkan Golkar; kasus pemilu 1999 yang menghujat habis Golkar; kasus Dekrit Presiden Gus Dur yang juga ingin membubarkan Golkar; sampai dengan pengadilan untuk, sekali lagi, ingin membubarkan Golkar. Begitu sering partai ini ingin dibubarkan oleh pihak luar.

Kini yang dihadapi Golkar bukanlah pihak luar, tetapi orang dalam, ketua umumnya sendiri. Begitu banyak kendala psikologis, perkawanan, dan solidaritas atas penderitaan ketua umum, yang bermain. Belum lagi jika dihitung jasa Akbar Tandjung untuk melindungi Golkar.

Majalah Tempo acapkali memberitakan bahwa dana Bulog itu mengalir dari tangan Akbar Tandjung kepada dua bendahara Golkar, Fadel Muhammad, dan Hidayat. Tempo memiliki kopi

bukti itu. Jika skenario ini yang ditelusuri pengadilan, bisa jadi nasib Golkar akan buruk dan benar-benar dibubarkan.

Di sini peran kepahlawanan Akbar Tandjung terhadap partainya. Ia tanggung sendiri semua masalah yang ada, dan tetap setia dengan skenario lain, bahwa uang itu mengalir ke Yayasan Rahdlatul Jannah, bukan ke Golkar. Apakah kelak Akbar Tanjung diputuskan benar atau salah, yang pasti Golkar sebagai partai sudah selamat.

Ia menderita lahir batin karena kasus ini. Keluarganya juga ikut menderita. Kerugian materil mungkin masih dapat ia tanggung. Namun hujatan publik dan taruhan karir politiknya pribadi adalah hal yang jauh lebih berat.

Persepsi tindakan kepahlawan Akbar Tandjung ini dirasakan hampir oleh semua elit Golkar, baik di pusat ataupun di daerah. Dalam situasi seperti ini, ada lubang besar berupa kendala psikologis bagi elit Golkar untuk menyingkirkan Akbar Tandjung.

Semua tahu, dalam situasi sekarang, mempertahankan Akbar Tandjung sebagai ketua umum akan merugikan citra partai Golkar sendiri. Semua tahu, bahwa partai lain memang berharap Akbar tetap memimpin Golkar agar dukungan kepada Golkar beralih ke partai mereka sendiri. Semua tahu bahwa seharusnya sebagai partai Golkar lebih mengutamakan kepentingan partai ketimbang sentimen pribadi kepada ketua umumnya. Namun mayoritas elit Golkar terkunci dalam kendala psikologis itu.

Hanya sedikit elit Golkar yang mampu keluar dari kendala psikologis itu. Dari yang sedikit, yang menonjol, adalah Marwah Daud Ibrahim. Ia merekomendasikan Akbar Tandjung untuk mundur sebagai ketua DPR. Terlalu banyak tenaga, waktu dan pikiran akan dihabiskan hanya untuk mempertahankan Akbar Tandjung sebagai ketua DPR.

Sebagai seorang negarawan, kepentingan partai memang diutamakan, namun kepentingan Republik Indonesia harus lebih diutamakan lagi. Sangat kasihan dengan negara ini, jika terus disibukan dengan pertarungan menggusur dan mempertahankan elit tertentu. Sementara begitu banyak krisis yang harus diselesaikan.

Mayoritas pakar, intelektual dan pengamat yang netral, yang ingin pemerintah berwibawa, sepakat memang sebaiknya DPR tidak terganggu oleh posisi hukum ketuanya. Jika ketua DPR sedang bermasalah, demi kepentingan yang lebih besar, ketua itu mengalah untuk non aktif atau mundur. Jabatan politik bukanlah segalanya. Reputasi dan perasaan tanggung jawab jauh lebih mengharumkan seorang pemimpin.

Toh kompromi dapat dilakukan. Misalnya, Akbar Tandjung mundur, lalu kursi ketua DPR tetap diberikan kepada tokoh Golkar yang lain. Golkar akan tetap hadir secara kelembagaan dalam jajaran pimpinan nasional.

Akbar juga disarankan untuk non aktif sebagai ketua umum Golkar. Bahkan jika perlu dengan kontrak yang tertulis. Seandainya Akbar Tandjung pulih secara hukum, dinyatakan tidak bersalah, secara otomatis, posisi ketua umum Golkar kembali diserahkan kepadanya.

Sampai hari ini, pandangan dari Marwah Daud masih minoritas di jajaran pimpinan elit pusat dan daerah. Kendala psikologis masih mendominasi elit Golkar.

Sebelum pemilu 2004, elit Golkar harus bersikap demi kepentingan partai, dan paham kebangsaan yang disandang. Jika tidak, sejarah akan menyaksikan sebuah jenis bunuh diri politik yang unik ala Golkar. Elit partai ini akan diingat menciderai partainya sendiri demi solidaritas kepada ketua umum secara personal.

Satu-satunya skenario yang dapat membantah bunuh diri politik di atas adalah keyakinan yang teramat kuat, yang kemudian terbukti, bahwa pada waktunya Akbar Tandjung akan dibebaskan pengadilan. Lalu sebelum pemilu 2004 dimulai, Akbar Tandjung kembali populer.

Bagian Keempat
Seputar Konflik dan Terorisme

Rekayasa Konflik di Ambon?

PANGLIMA laskar Jihad Ja'far Umar Thalib sudah ditangkap. Sebelumnya, pimpinan Front Kedaulatan Maluku Alex Manuputty sudah pula ditahan petugas. Dua tokoh ini dikenal sebagai pimpinan kelompok garis keras dari komunitas Islam dan Kristen yang terus bertikai di Ambon. Dengan ditahannya dua gembong itu, akankah Ambon memasuki era damai?

Konflik berdarah di Ambon menyimpan banyak misteri. Sebelum era reformasi, Ambon termasuk wilayah yang tenang. Namun setelah reformasi, Ambon bersimbah darah oleh konflik agama yang tidak henti. Sudah ribuan nyawa melayang. Bangunan publik, mulai dari rumah ibadah, sekolah, gedung perkantoran luluh lantak dibakar ataupun dihancurkan. Penduduk hidup dalam rasa cemas, terteror, takut, marah dan sedih, bercampur baur.

Konflik primordial memang tidak hanya terjadi di Ambon. Namun di wilayah lain, konflik itu terjadi secara sporadis dan kemudian selesai. Di Ambon, konflik primordial itu bertahan

dan tidak kunjung selesai selama lebih dari tiga tahun. Padahal Ambon hanyalah wilayah yang kurang dari tiga ratus ribu penduduk. Bagaimana mungkin wilayah sekecil itu gagal dikendalikan baik oleh pemerintahan daerah ataupun oleh aparat keamanannya?

Padahal di Ambon sudah dilaksanakan perjanjian Malino 2. Dalam perjanjian itu, berbagai pihak yang bertikai duduk bersama. Mereka mendiskusikan apa yang menjadi perbedaan selama ini. Kemudian bersama-sama pula mereka mencari jalan keluar yang disepakati. Sudah pula diterapkan Darurat Sipil. Penguasa Darurat Sipil daerah diberikan kekuasaan ekstra untuk mengendalikan keadaan. Bahkan aneka kebebasan sipil yang lazim dipraktikkan di era reformasi, khusus untuk Ambon, dapat dikekang, demi tegaknya tertib masyarakat.

Ternyata, Malino 2 tidak kunjung berhasil. Darurat Sipil juga belum menunjukkan hasilnya. Pembunuhan dan penyerangan terus terjadi. Mengapa kota sekecil Ambon, yang jumlah penduduknya hanya sebesar sebuah kecamatan di Jakarta, begitu sulit dikendalikan?

Ada penjelasan dari pakar sosiologi yang banyak meneliti Ambon, Dr. Tamrin Amal Tomagola. Pandangannya cukup kontroversial, namun layak untuk direnungkan, sekaligus juga dikritisi, dan diverifikasi oleh para akademisi lain kelak, ketika situasi Ambon sudah dingin.

Menurut Tamrin, pihak aparat keamanan memang sengaja memelihara konflik di Ambon. Lebih dari sekedar memelihara, aparat keamanan, menurut Tamrin, bahkan terlibat dalam merekayasa konflik. Melalui aneka tulisan ataupun wawancara, Tamrin mengemukakan bukti terbaru sebagai berikut.

Pertama, adanya kasus bom yang meledak di Ambon tanggal 3 April 2002. Bahan peledak itu, menurut Tamrin, dilihat dari kehancuran yang diakibatkannya, tidak dimiliki oleh kedua

belah pihak yang bertikai. Akibat ledakan ini, jelas Tamrin, sekelompok masyarakat yang menjadi korban mengamuk, berdemonstrasi dan melempari kantor gubernur dengan batu.

Kedua, serangan fajar ke desa Soya, akhir April 2002. Ketika terjadi serangan, tidak ada satu aparat keamanan pun di sana. Padahal, menurut Tamrin, pihak keamanan sudah tahu beberapa jam sebelumnya bahwa akan ada serangan itu. Tamrin mengaku bahwa pihaknya mempunyai bukti sinyal radio yang menunjukkan pengetahuan aparat keamanan akan serangan desa Soya. Sungguhpun tahu, aparat keamanan tidak bertindak. Bahkan tidak satupun dari pihak penyerang yang tertangkap.

Ketiga, tidak kooperatifnya aparat keamanan terhadap penguasa darurat sipil, Gubernur Latuconsina. Seperti diakui sendiri oleh Gubernur, berbagai perintahnya tidak dijalankan oleh aparat keamanan yang bertugas. Padahal, menurut Tamrin, 80% dari keberhasilan darurat sipil dan perjanjian Malino 2, berada di tangan aparat keamanan. Jika aparat menolak perintah, dengan sendirinya kebijakan penguasa Darurat Sipil tidak pernah efektif.

Keempat, dihembuskannya kembali isu separatisme RMS. Agak aneh, tiba-tiba bendera RMS berkibar di lokasi SMU, yang jaraknya hanya 50 m dari Mapolda Maluku. Bagaimana mungkin aparat keamanan dapat kecolongan? Padahal sejak jauh hari aparat keamanan sudah mengetahui berbagai titik yang mungkin digunakan untuk pengibaran bendera RMS.

Menurut Tamrin, ada kemungkinan isu RMS kembali diangkat oleh pihak aparat keamanan sendiri untuk mengubah peta konflik. Yaitu dari konflik horizontal antara masyarakat versus masyarakat, menjadi konflik vertikal, antara pemerintah versus masyarakat.

Apa gunanya merubah peta konflik? Jika aparat keamanan memang terlibat dalam merekayasa konflik, apa targetnya?

Tamrin pun mengelaborasi beberapa alasan. Pertama, ini disebabkan kesalahan dalam proses Malino 2. Perundingan Malino seharusnya berada di bawah yurisdiksi Menko Polkam, namun dalam kenyataannya justru Menko Kesra yang banyak terlibat. Akibatnya, menurut Tamrin, sebagian aparat keamanan merasa termarginalisasi. Lalu aparat keamanan membuat manuver agar mereka kembali menjadi aktor utama untuk mengendalikan situasi.

Kedua, konteks politik berkaitan dengan pergantian Gubernur Maluku. Masa jabatan Gubernur Latuconsina akan segera berakhir. Keberhasilan Malino 2 dan suasana damai di Ambon akan memberikan kredit bagi sang gubernur dan kelompoknya. Kelompok ini dengan mudah akan kembali berkuasa. Manuver dilakukan untuk mengganggu kelompok ini agar gubernur yang akan terpilih nanti adalah gubernur yang berasal atau dapat diterima oleh pihak aparat keamanan. Apalagi jika darurat militer diberlakukan. Komando di wilayah itu akan berada di tangan pihak militer sendiri.

Ketiga, menurut Tamrin, di wilayah Seram Utara, Timur dan Selatan, ditemukan kandungan minyak yang besar. Wilayah ini berpotensi menjadi area yang akan menghasilkan banyak uang. Pihak Kuwait, jelas Tamrin, sudah mengeluarkan uang sebesar US\$ 500 juta untuk mengeksplorasi. Harta terpendam ini membuat wilayah Ambon dan Maluku punya pesona bagi sebuah pertarungan kekuasaan.

Ini yang menjadi sebab mengapa kota sekecil Ambon tidak kunjung damai walau sudah ada Malino 2 dan darurat sipil. Benarkah penjelasan Dr. Tamrin? Sebagai sebuah penjelasan, apa yang dipaparkan Dr. Tamrin memang rasional, menggugah, provokatif dan logis. Namun tidak semua yang rasional, menggugah, yang provokatif, dan yang logis itu otomatis pasti benar. Banyak kasus kebohongan, ilusi dan imajinasi juga tidak kalah rasional, menggugah, provokatif dan logis.

Pada saatnya para akademisi akan meneliti Ambon. Pada saat itulah penjelasan Dr. Tamrin akan dibuktikan, apakah Tamrin mengungkapkan fakta yang benar, atau ia hanya menyatakan sebuah spekulasi teoritis yang terlalu banyak unsur imajinasi.

Laskar Jihad, FPI, dan Mujahidin

INDONESIA selalu punya cara menghalau gerakan Islam garis keras. Di era Orde Baru, gerakan itu ditolak secara represif dan otoritarian. Di era reformasi yang penuh kebebasan, gerakan itu menjadi surut justru karena manuver yang dibuatnya sendiri. Impresi ini muncul secara spontan mengamati persoalan yang timbul secara serentak di tiga organisasi Islam garis keras: Laskar Jihad, FPI (Front Pembela Islam) dan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia).

Di sela-sela hiruk pikuk berita mengenai Tragedi Bali, Laskar Jihad, organisasi yang terlibat dalam konflik di Ambon dan Poso, membubarkan diri. Sementara panglima tertingginya, Jafar Umar Thalib masih terus diproses di pengadilan dengan tuduhan provokasi dan hasutan. Habib Rieziq, ketua FPI juga ditahan. Pimpinan dan aktivis FPI terancam dipenjara, menyusul penghancuran tempat hiburan yang dilakukannya.

Perkembangan yang paling hot adalah di tahannya Abu Bakar Ba'asyir, pimpinan MMI. Ba'asyir ditahan dalam posisinya

sebagai pemimpin spiritual Jemaah Islamiyah, dengan tuduhan jauh lebih seram, yaitu terlibat dalam upaya pembunuhan presiden RI, Megawati Soekarnoputri. Walau ditahannya Abu Bakar Ba'asyir memang tidak berhubungan dengan MMI, namun akan ada dampak politis yang besar atas MMI sendiri.

Di bidang hukum, sebelum ada vonis pengadilan, tentu ketiga tokoh di atas harus tetap diasumsikan belum tentu bersalah. Namun di bidang politik sudah dapat diambil kesimpulan bahwa memang ada ketidaksesuaian antara prinsip demokrasi dan Islam garis keras sebagaimana yang dipraktikkan oleh tiga tokoh dan tiga organisasi di atas. Demokrasi yang tumbuh sejak gerakan reformasi memberikan kebebasan buat semua tanpa diskriminasi. Justru karena demokrasi, organisasi Islam garis keras seperti Laskar Jihad, FPI dan MMI dapat tumbuh dengan subur. Namun melalui perjalanan waktu, Laskar Jihad, FPI dan MMI berkembang menjadi ancaman terhadap lembaga dan kultur demokrasi itu sendiri. Tindakan tiga organisasi Islam di atas bertentangan dengan prinsip penting demokrasi seperti tindakan nonkekerasan dan penghormatan atas pluralisme.

Tidak ada yang salah dengan tujuan dasar FPI dan orientasi politiknya yang menentang tempat hiburan atau tempat maksiat. Orientasi dan gaya hidup yang ingin diperjuangkan FPI tidak secara otomatis membahayakan demokrasi. Dalam pluralisme demokrasi, gaya hidup dan orientasi FPI itu diberikan tempat untuk tumbuh.

Namun demokrasi juga harus memberikan tempat yang sama kepada gaya hidup yang berbeda dengan pilihan FPI. Kebebasan yang diberikan demokrasi termasuk kebebasan untuk memilih gaya hidup dan mencari kesenangan di tempat hiburan, sejauh ia tidak melakukan pemaksaan dan tidak melanggar hukum formal yang berlaku. Bahkan di Malaysia, yang tidak sepenuhnya demokratis, dan pemerintahannya lebih Islami, juga ada tempat yang legal bagi perjudian.

FPI menjadi tidak sesuai dengan demokrasi karena ia kemudian melakukan pemaksaan cara berpikir dengan kekerasan. FPI merasa hanya pilihan gaya hidupnya sendiri yang boleh dipraktikkan. Organisasi ini tiba-tiba merasa punya hak menjadi polisi swasta dan menghancurkan dengan kekerasan berbagai tempat hiburan. Atas nama agama Islam yang suci, lengkap dengan atribut pakaian dan slogannya, FPI seolah menjadi tentara Tuhan yang ingin membersihkan dunia.

Celaknya maksud yang suci di dunia yang tidak sempurna justru memperlihatkan sosok FPI yang sebenarnya. Aneka media memberitakan betapa oknum FPI terlibat dalam kasus pemerasan. Aneka tempat hiburan itu mereka sodorkan permintaan sumbangan untuk peringatan hari agama. Melalui oknum itu, agama Islam yang suci telah “dijual” sang oknum dengan harga yang sangat murah hanya untuk mencari uang, di tempat hiburan yang justru mereka haramkan. Ini sebuah kemunafikan yang sempurna.

Laskar Jihad mempunyai persoalan yang berbeda. Organisasi itu tumbuh dengan misi yang begitu agung dan suci, yaitu melindungi sesama pemeluk agama dari kemungkinan dibunuh atau terbunuh dalam konflik horizontal yang ganas. Secara sukarela dan dimobilisasi, ratusan aktivis Laskar Jihad menyeberang lautan, dengan resiko mati, menjalankan misi suci diatas.

Misi Laskar Jihad itu sama sucinya dengan Martin Luther King ketika ia memobilisasi kulit hitam Protestan untuk membela hak-hak sosial kulit hitam. Dan sama sucinya dengan upaya Mahatma Gandhi menginspirasi warga India berkorban demi kemerdekaan negara. Bedanya, Gandhi dan Manin Luther King mengembangkan metode perjuangan yang sesuai dengan demokrasi. Sementara Jafar Umar Thalib dan Laskar Jihad memilih metode yang justru dapat membunuh demokrasi.

Gandhi dan Martin mengembangkan semangat non-kekerasan dan cinta kasih. Menghadapi represi pihak lawan yang keras dan tidak jarang dengan senjata, Gandhi dan Martin tidak henti-henti meminta pengikutnya untuk tidak membalas dengan kekerasan.

Bahkan Gandhi mengatakan bahwa jika kalian melawan musuh dengan rasa marah, kalian sudah gagal. Ujar Gandhi kepada pengikutnya, kalian hanya menjadi pejuang jika sudah dapat melawan tanpa rasa benci. Sejarah kemudian mencatat justru metode Gandhi dan Martin Luther King berhasil mendapatkan simpati dunia.

Sementara Jafar Umar Thalib dan Laskar Jihad justru terjebak dalam provokasi berdarah. Dalam pidatonya, Jafar bahkan dianggap memprovokasi kebencian tidak hanya kepada kelompok Kristen namun juga kepada pemerintah RI. Simbol Islam justru digunakan untuk memobilisasi pengikutnya dalam bentrokan berdarah dan kemarahan. Ujung dari metode itu menyeret sang panglima laskar ke pengadilan.

Berbeda dengan dua organisasi diatas, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) tidak pernah terdengar menggunakan kekerasan fisik. Abu Bakar Ba'asyir juga ditahan tidak berhubungan dengan MMI yang dipimpinnya. Namun MMI terjebak dalam perangkap yang sama. Organisasi ini menggunakan Islam untuk tidak toleran terhadap pluralisme dan keberagaman ruang publik.

Atas nama Islam dan Tuhan, MMI mengancam media massa secara hukum unruk tidak menyiarkan kepercayaan atau gaya hidup yang berbeda dengan yang diyakini oleh MMI. Karena MMI percaya Islam itu satu, maka MMI merasa berhak melarang media mengiklankan "Islam Warna-Warni." Karena MMI tidak senang dengan "kondom anti Aids", ia pun mengancam secara hukum media yang mengkampanyekannya.

Secara kasat mata, memang MMI berjalan dalam rel hukum. Namun cara berpikir MMI tetap dikuasai semangat otoritarian yang sama, bahwa hanya cara berpikir mereka yang diterima Tuhan, dan cara berpikir lain harus tidak boleh disiarkan di ruang publik. Walau aksi mereka tetap dibungkus hukum, namun cara berpikir itu tetap berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yang mengandalkan pada penghormatan atas keberagaman.

Kini Laskar Jihad sudah dibubarkan sendiri oleh pimpinannya. FPI sedang bermasalah di pengadilan. Dan MMI akan pula terkena efek dari kasus Abu Bakar Baasyir. Terlepas dari ketidaksetujuan kita kepada mereka secara politis, mereka tetap layak diadili secara jujur dan fair. Justru dalam pengadilan yang fair terletak keindahan demokrasi, yang tetap menghormati hak hukum dari para penolak demokrasi itu sendiri.

Pengadilan Buat Ba'asyir

DALAM dunia yang sudah terbelah seperti sekarang, seorang tokoh dapat dilabel dua julukan sekaligus yang saling bertolak belakang. Di satu komunitas, ia dianggap raja terorisme dan kepala mafia politik. Namun dalam komunitas yang lain, ia dianggap sebagai pejuang kebebasan dan simbol perlawanan yang dicintai. Osama Bin Laden menjadi musuh publik nomor satu di Amerika Serikat. Namun kini Osama Bin Laden juga menjadi pahlawan terbesar bagi sebagian orang.

Abu Bakar Ba'asyir, guru agama yang sederhana asal Indonesia juga dilabel dua julukan sekaligus. Bagi negara seperti Amerika Serikat, Singapura dan Australia, guru ngaji ini dianggap tokoh yang paling berbahaya di Asia Tenggara. Ia dicurigai menjadi pimpinan spiritual Jemaah Islamiyah, organisasi teroris. Ba'asyir dianggap berada di balik berbagai aksi teror di Asia Tenggara. Ia pun dituduh merencanakan berdirinya sebuah Negara Islam Raya yang meliputi Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina Selatan, dan bahkan Australia.

Oleh pemerintah Indonesia, Ba'asyir juga terkena tuduhan yang tidak kepalang tanggung. Ia sedang diproses hukum untuk tuduhan pengeboman berbagai tempat, termasuk Mesjid Istiqlal sendiri. Lebih dari itu, Ba'asyir dituduh pula terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun Ba'asyir tidak semakin terkucil atau terisolasi dari publik luas. Sebaliknya, dukungan dan simpati atas Ba'asyir justru semakin luas. Oleh sebagian komunitas, ia bahkan dianggap sebagai simbol keberanian melawan arogansi Amerika Serikat, simbol tokoh yang ingin menjalankan Islam semurni mungkin, dan simbol ketidakberdayaan rakyat dihadapan penguasa.

Berbeda dengan Osama Bin Laden yang kini tidak tahu rimbanya, Ba'asyir sudah berada di tangan polisi. Jika Osama akan terus menjadi misterius dan legenda, nasib Ba'asyir akan sangat tergantung dari hasil pengadilan. Ba'asyir mungkin bertambah populer, namun mungkin pula ia akan dijauhi oleh publiknya sendiri secara perlahan.

Melihat karakter dan komposisi pendukungnya, tidak semua pendukung Ba'asyir golongan the true believers. Sejauh ini pendukung Ba'asyir dapat dipetakan ke dalam tiga kategori. Pertama, pendukung Ba'asyir karena kesamaan pandangan agama dan ideologi. Mereka adalah para pendukung yang ikatan batinnya atas Ba'asyir sangat dalam. Mereka pula yang mengancam akan melaksanakan bom bunuh diri jika pemerintah bersikap tidak adil terhadap Ba'asyir.

Jenis pendukung ini sangat percaya bahwa Syariah Islam harus ditegakan secara penuh, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, namun juga kehidupan publik. Konsekuensi politik dari keyakinan ini memang berat. Sejak dulu, misalnya, Ba'asyir sudah menentang asas tunggal Pancasila. Ba'asyir dan pengikutnya memilih ditahan dan menjadi buronan ketimbang harus tunduk kepada Pancasila.

Negara demokrasi model barat jelas bukan cita-cita ideal bagi pengikut Ba'asyir. Sulit bagi mereka menerima pluralisme dalam ruang publik. Mereka sangat ingin ruang publik itu hanya didominasi oleh keyakinan atau interpretasi agama mereka sendiri. Sebelum berkuasa saja, misalnya, mereka sudah mensomasi aneka TV yang mengiklankan "Islam warna-warni." Karena mereka yakin Islam itu tunggal, tidak warna-warni, maka ruang publik tidak boleh dikotori atau mengkampanyekan pandangan yang berbeda dengan pandangan yang diyakini oleh kelompok Ba'asyir.

Interpretasi agama dan ideologi model pengikut Ba'asyir punya musuh global. Amerika Serikat menjadi musuh utama, menjadi "Setan Besar" karena memimpin sebuah keyakinan lain, yang membahayakan eksistensi keyakinan Ba'asyir sendiri. Terjadinya "The Clash of Civilizations" antar peradaban barat yang Kristen versus Islam, sangat diyakini oleh pengikut Ba'asyir jenis the true believers ini.

Kedua, pendukung Ba'asyir karena punya musuh bersama. Jenis pendukung ini bukanlah pendukung ideologi atau interpretasi agama Ba'asyir. Mereka tidak meyakini cara Ba'asyir memahami agama. Mereka juga tidak percaya adanya "The Clash of Civilizations", antara peradaban barat yang Kristen versus Islam. Mereka juga bukan tipe pengikut yang bersedia melakukan bom bunuh diri demi keyakinannya.

Mereka mendukung Ba'asyir lebih karena kebencian kepada standard ganda Amerika Serikat. Mereka marah atas prinsip politik AS (Amerika Serikat), selaku polisi dunia, dan satu-satunya super power yang ada. Dalam pandangan mereka, AS terobsesi ingin memberlakukan sisa dunia hanya sebagai perluasan kepentingan nasionalnya saja. Di satu sisi, AS mengecam kekerasan yang membunuh penduduk sipil, namun AS sendiri juga membunuh penduduk sipil di Afganistan, dan mendukung, setidaknya berdiam diri atas aksi kekerasan Israel di Palestina.

AS melarang negara lain mengembangkan nuklir dan senjata pembunuh massal. Irak akan diserang secara sepihak (unilateral) karena isu bom pembunuh massal itu. Padahal, senjata yang sama bahkan lebih dahsyat dikembangkan di AS sendiri. Apa hak moral yang dimiliki AS untuk menjadi penentu dunia?

Ba'asyir dianggap oleh kelompok ini sebagai korban arogansi AS. Sementara kesalahan Ba'asyir belum pasti, namun opini sudah terbentuk yang merugikan Ba'asyir. Al Faruk yang menjadi saksi kunci untuk menjebloskan Ba'asyir dianggap sepenuhnya berada dalam kontrol AS. Kelompok ini mendukung Ba'asyir lebih karena Ba'asyir menjadi simbol perlawanan terhadap penguasa dunia itu.

Ketiga, pendukung Ba'asyir yang tidak pro pada syariah Islam dan tidak marah kepada AS. Mereka mendukung Ba'asyir lebih karena menginginkan ditegakkannya keadilan dan kebenaran. Ba'asyir mereka pandang sebagai wakil dari orang lemah yang diperlakukan secara kurang senonoh oleh negara.

Polisi dianggap begitu kasarnya memberlakukan Ba'asyir. Seorang tua yang sudah renta dan lagi sakit, diambil paksa oleh polisi. Sementara mereka melihat ada koruptor yang sudah merugikan negara, dan sudah menjadi tersangka, dibiarkan saja oleh polisi, berleha-leha di Singapura. Tuduhan terorisme atas Ba'asyir juga mereka ragukan. Ba'asyir memang tokoh Islam garis keras, dan sangat anti Amerika Serikat. Namun itu tidak berarti Ba'asyir membenarkan kekerasan dan teror untuk keyakinannya.

Tiga jenis pendukung Ba'asyir ini memiliki tingkat kesetiaan yang berbeda. Pendukung ideologi Ba'asyir, pendukung jenis pertama, the true believers, akan terus bersama Ba'asyir apapun hasil pengadilan kelak. Jumlah mereka minoritas. Mayoritas Islam di Indonesia adalah jenis Muhammadiyah dan NU yang

dapat menerima asas tunggal Pancasila. Sedangkan pendukung Ba'asyir jenis lainnya, jenis kedua dan ketiga, akan segera menjauhi Ba'asyir jika ia dibuktikan bersalah di pengadilan kelak.

Hasil pengadilan atas Ba'asyir akan sangat menentukan bobot ketokohnya. Jika kesalahannya tidak dapat dibuktikan, Ba'asyir akan semakin menjadi legenda. Ia akan terus berkembang menjadi salah satu tokoh informal yang sangat berpengaruh dan mendapatkan simpati luas, dari kalangan yang beragam.

Sebaliknya, jika ia dibuktikan bersalah, dengan alat bukti yang terpercaya, berdasarkan pengadilan yang fair dan jujur, maka itu akan menjadi akhir dari ketokohan Ba'asyir. Ia segera menjadi pesakitan. Opini perlahan-lahan akan membentuknya sebagai the public enemy nomor satu.

Politik Fantasi Para Teroris

AMROZI tersenyum dan melambaikan tangan. Fotonya dengan penampilan yang sangat rileks, akrab dan lucu itu menghiasi tidak hanya media nasional, tetapi juga media luar negeri. Sosoknya dengan senyum lepas tidak mengesankan seorang tersangka teroris. Tidak dapat diduga bahwa di balik senyumnya itu, ia kini sedang diproses karena terlibat dalam Bom Bali yang telah merenggut hampir 200 nyawa. Dari penampilannya, Amrozi lebih tampak seperti seorang bintang pop atau telenova yang imut-imut.

Kita mengenal lebih jauh wilayah psikologis Amrozi melalui Pastika, ketua tim investigasi untuk kasus Bali. Menurut Pastika, Amrozi tidak menampakkan rasa menyesal. Ia mengaku terlibat pengeboman namun menurutnya, korban bule-bule itu memang sudah seharusnya mati. Ketika dinyatakan bahwa ia dapat dikenakan hukuman mati, dengan ringan Amrozi menjawab bahwa itu tidak ada masalah, karena berarti ia akan mati syahid.

Seketika kita teringat makalah yang dibuat Lee Harris berjudul *Al Qaeda's Fantasy Ideology*. Pandangan dunia dan kondisi psikologis Amrozi menyerupai apa yang disebut Lee Harris sebagai bentuk baru teroris.

Ada yang tetap dan ada yang berubah dalam evolusi terorisme. Sejak dulu, yang tetap, terorisme masih merupakan senjata bagi pihak yang lemah. Mekanisme politik biasa, melalui parlemen atau perang opini secara damai di media, tidak dapat dilakukan oleh kelompok teroris. Sumber daya mereka memang tidak cukup signifikan untuk terlibat dan berpengaruh melalui mekanisme politik normal. Hanya melalui kekerasan dan jalan pintas pembunuhan, suara mereka akan didengar dan publik mencari tahu apa kepentingan mereka.

Namun ada yang berubah dalam evolusi terorisme. Terorisme gaya lama melakukan segala tindakan kekerasan dengan perhitungan politik yang sangat rasional. Korban dan sasaran dipilih secara terhitung dengan efek politik yang dikalkulasi secara matang. Namun terorisme gaya baru tidak lagi berangkat dari kalkulasi politik rasional. Sebaliknya, yang dipentingkan oleh terorisme gaya baru adalah fantasi politik, sebuah ideologi yang lebih ingin mencari pemuasan fantasi psikologis.

Lee Harris, misalnya, membandingkan terorisme yang melanda Amerika Serikat di zaman Pearl Harbor dan Tragedi 11 September. Pengeboman Pearl Harbor mewakili terorisme gaya lama. Lokasi pemboman adalah pangkalan laut AS. Target itu memang diperhitungkan secara matang sekali oleh sebuah grup teroris, yang merupakan state terrorism, Jepang. Dengan di bomnya Pearl Harbor, armada perang AS diharapkan melemah. Lalu AS diarahkan oleh kelompok teroris itu untuk tidak melibatkan diri dalam perang dunia kedua.

Namun pemboman dalam Tragedi 11 September tidak secara sengaja ingin melemahkan kekuatan AS. Dua lokasi yang dibom, World Trade Center dan Pentagon, bukanlah inti kekuatan AS,

seperti halnya Pearl Harbor. Dua gedung itu hanyalah simbol dari kedidayaan AS. Yang satu simbol keunggulan kapitalisme, yang satu lagi simbol dari kejayaan militer AS.

Hancurnya dua gedung itu dengan mudah dapat dibangun kembali tanpa mengurangi kekuatan AS. Yang hendak dicapai oleh Tragedi 11 September, menurut Lee Harris, hanyalah politik fantasi dari kelompok teroris, Al Qaeda. Kelompok ini, mendapatkan kepuasan ideologis dengan melihat meluasnya rasa rakut dikalangan masyarakat AS. Ini justru menjadi motivasi psikologis yang lebih “psikopat” dan kejam.

Terorisme bentuk baru ini dapat menggunakan keyakinan apa saja untuk memenuhi fantasi politiknya. Jika ia menggunakan agama, jelas agama itu sudah direduksi sedemikian rupa untuk mendukung, atau melegitimasi kebutuhan fantasi itu. Dan inilah puncak fantasi yang paling mengerikan, mencari kepuasan psikologis melalui pembunuhan dan kekerasan terhadap sejumlah warga sipil dari sebuah kaum.

Terorisme gaya lama juga sangat menghitung jumlah korban yang akan ditawan atau dibunuh. Karena ingin tuntutan politiknya tercapai, mereka tidak pernah mengambil korban yang terlalu banyak. Korban hanya diambil untuk unsur dramatisasi dan tekanan. Mereka juga ingin eksis di masyarakat dan mendapatkan simpati. Terorisme tempo dulu jauh lebih sering menawan sandera dengan tebusan aksi politik tertentu.

Namun terorisme gaya baru memiliki hukumnya sendiri. Yang dipentingkan oleh kelompok ini adalah pemenuhan fantasi politik mereka. Akibatnya ada kecenderungan untuk memaksimalkan jumlah korban. Semakin besar jumlah korban, semakin terpenuhi naluri dan fantasi politik mereka. Tidak heran, Tragedi 11 September telah mengambil jumlah korban terbesar sepanjang sejarah dalam satu peristiwa. Tidak pernah ada jumlah korban sebesar 4000 nyawa dari berbagai bangsa mati secara serentak.

Tragedi Bali juga didisain untuk memperoleh korban sebanyak mungkin. Bom pertama di Paddys's club untuk memancing para turis ke luar ke jalan. Lalu meledaklah bom yang sebenarnya, di Sari's club. Semakin banyak pengunjung yang tumpah di jalan, semakin besar pula jumlah korban yang mati. Fantasi politik para teroris itu lebih terpuaskan.

Terorisme gaya lama meninggalkan jejak dan secara sengaja menyebut identitas dan tuntutan mereka. Brigade Merah di Italia, misalnya, mengklain kelompok mereka lah yang melakukan kekerasan. Lalu mereka nyatakan apa yang mereka inginkan agar kekerasan serupa tidak terjadi lagi.

Namun terorisme gaya baru justru menghilangkan jejak. Mereka tidak ingin identitas mereka diketahui. Jika menggunakan mobil sebagai sarana tempat bom, misalnya, nomor mesin mobil itu dihilangkan terlebih dahulu. Ini dilakukan karena mereka tidak ingin ditangkap, dan tidak punya tuntutan politik yang jelas. Mereka hanya ingin berfantasi sesuai dengan keyakinan pribadi mereka sendiri. Bedanya, jika orang banyak yang normal mencari fantasi dan kepuasan dengan, misalnya, pergi ke pantai; mereka memenuhi fantasi dengan membunuh tanpa meninggalkan jejak.

Terorisme gaya lama mempunyai target lokal atau nasional. Yang menjadi tuntutan mereka, umumnya, hanyalah kebijakan nasional tertentu, atau tebusan uang bagi konsolidasi kelompok terorisme itu sendiri. IRA di Inggris, misalnya, hanya menargetkan politisi nasional atau tokoh penting lokal.

Sementara target terorisme gaya baru sudah mendunia. Mereka, misalnya, ingin menumpahkan fantasinya kepada Amerika Serikat berikut kepentingannya di seluruh dunia. Ada fantasi yang membuat mereka membayangkan bahwa mereka sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sedang menghadapi wakil setan kepentingan AS di seluruh dunia. Di negara mana saja,

warga AS menjadi tidak aman. Jika mereka berhasil membunuh wakil setan itu, di mana saja, di seluruh dunia, ada fantasi yang memberikan kepuasan puncak.

Kita tidak tahu, apakah Amrozi juga sedang berfantasi sebagaimana teroris gaya baru. Sebelum keputusan pengadilan, tentu Amrozi punya kemewahan untuk tidak dapat dikatakan bersalah dahulu. Kita sendiri berharap Amrozi bukanlah teroris itu. Karena jika ia adalah teroris, hidup kita semakin mengerikan. Bagaimana mungkin seorang teroris begitu imut-imut dan membunuh dengan begitu riang dan rileks?

Hadiah Nobel untuk Aceh?

BAYANGKAN skenario seperti ini. Di tahun 2005, pemerintah RI, tokoh GAM dan pimpinan Henry Dunant Center diminta terbang ke Oslo, Swedia. Mereka dianugrahi Nobel Perdamaian karena mengakhiri konflik panjang di Aceh. Dunia mengapresiasi perkembangan yang sangat positif di Aceh. Kasus Aceh bahkan kemudian menjadi referensi akademis banyak kajian dan contoh kasus conflict resolution yang berhasil.

Mungkinkah ini terjadi? Hal itu dapat terjadi hanya jika terjadi perubahan yang signifikan atas struktur dan orientasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada level orientasi politik, GAM berubah dari tuntutan Aceh merdeka menjadi tuntutan kesejahteraan dan demokrasi di Aceh di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada level metode gerakan, GAM juga berubah dari kekuatan masyarakat bersenjata menjadi kekuatan politik sipil tanpa senjata. Lalu GAM berjuang melalui parlemen dan opini publik, dengan tanpa kekerasan. Pada level keanggotaan dan

kepemimpinan, GAM sepenuhnya bersifat lokal atau nasional. Semua pemimpinnya diharuskan berwarga negara Indonesia, agar menjadi jelas bahwa perjuangan Aceh tidak dipimpin warga negara asing

Pertanyaannya, Apa yang dapat membuat perubahan GAM seradikal itu dalam waktu dekat? Perubahan GAM ini hanya mungkin jika berlangsung perubahan komposisi elit di GAM, dari elit garis keras ke tangan elit yang moderat.

Setiap gerakan politik, apalagi yang sudah berusia panjang dan menghimpun banyak pengikut, selalu diwarnai oleh perbedaan paham. Di ujung yang paling kanan ada kelompok garis keras atau hardliners. Sedangkan di tengah dan di sebelah kiri ada kelompok yang moderat dan kompromis.

Bagi kalangan hardliners, kemerdekaan Aceh adalah harga mati. Sentimen kemerdekaan sebuah komunitas lokal yang homogen secara etnik memang mudah berkembang menjadi sejenis keyakinan, yang sama kuatnya dengan keyakinan agama. Ditambah lagi, keyakinan ini diperkuat oleh analisa yang rasional. Bagi mereka, jika Aceh merdeka, Aceh akan sekaya atau lebih kaya daripada Brunei Darul Salam. Minyak dan gas bumi melimpah di Aceh. Dalam sekejap, masyarakat miskin menjadi sejahtera setelah Aceh merdeka.

Dengan merdeka, kekuasaan elit Aceh atas tanah rencong juga sangat besar. Kekuasaan itu jelas lebih besar dibandingkan otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat sekalipun. Dengan kemerdekaan, Aceh bebas menentukan bentuk negaranya sendiri. Tanpa harus konsultasi dengan pusat, Aceh dapat menjadi negara demokrasi sekuler ataupun negara Islam. Demi kepentingan Aceh, menurut cara pandang garis keras ini, jangan lagi mencari solusi lain diluar kemerdekaan Aceh.

Namun kalangan yang moderat di GAM mengembangkan pandangan yang berbeda. Bagi mereka yang penting adalah

kesejahteraan dan jaminan damai di Aceh, bukan perjuangan menuju Aceh merdeka. Sampai berapa lama rakyat Aceh harus menderita hanya karena ilusi merdeka. Hampir mustahil negara Indonesia melepaskan Aceh, apalagi sejak ada trauma Timor Timur. Sementara hampir mustahil referendum dapat dilaksanakan di Aceh, tanpa restu Indonesia.

Ditambah pula dengan kondisi internasional yang tidak menguntungkan. Tidak ada satupun negara besar yang penting di dunia mendukung kemerdekaan Aceh. Berbagai negara besar dunia tidak mau mengambil resiko konflik dengan Indonesia, yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Tanpa dukungan AS, PBB, Inggris, Rusia, Cina, apa yang dapat dicapai oleh Aceh? Otonomi khusus yang dimodifikasi sudah dapat diterima oleh kalangan GAM moderat sebagai format politik Aceh di masa depan.

Pimpinan garis keras sudah tidak dapat lagi diubah ideologinya, mengingat itu masalah keyakinan pribadi yang sudah pula dilezatkan oleh perjuangan dan penderitaan. Namun pengaruh garis keras itu sudah harus diisolasi dan tidak lagi diberi tempat. Demi masa depan Aceh, GAM memang harus didominasi oleh pimpinan yang moderat.

Jelas pula bahwa GAM hanya mungkin dikuasai oleh kaum moderat jika didesak oleh dunia internasional. Desakan militer Indonesia hanya justru memberikan legitimasi bagi garis keras untuk tampil. Kekerasan dan represi tambahan dari militer hanya menambah jumlah para martir yang bersedia mati untuk Aceh merdeka.

Dunia internasional, di bawah Henry Dunant Center, atau lebih keras lagi, di bawah Amerika Serikat, dapat mengontrol GAM dengan apa yang disebut "cambuk dan gula-gula." Jika GAM bersikeras tetap berjuang untuk Aceh merdeka dan bersenjata, dunia internasional akan ikut mencambuk GAM. Mereka akan

meminta pimpinan GAM yang berwarga negara asing dilarang mencampuri urusan Indonesia. Lebih dari itu, mereka dapat mengancam memasukan tokoh GAM luar negeri itu dalam barisan teroris internasional yang harus diburu.

Dunia internasional akan pula mendukung penyelesaian militer yang diambil Indonesia untuk menumpas GAM dengan kekerasan, jika GAM masih tidak ingin mengubah orientasi politik dan metode perjuangan. Di semua negara demokrasi, gerakan separatism bersenjata memang sah untuk ditumpas secara bersenjata pula.

Pada saat yang sama, dunia internasional juga menawarkan “gula-gula.” Jika GAM dipimpin oleh kalangan moderat, yang merubah orientas politik, dan merubah metode gerakan, dunia internasional akan menjamin eksistensi elit GAM. Pemerintah Indonesia dapat diminta memulihkan hak-hak politik aktivis dan pemimpin GAM sehingga mereka berpeluang menjadi pimpinan Aceh. Tidak ada yang salah jika mantan pimpinan GAM menjadi Gubernur atau Bupati di Aceh di bawah naungan NKRI.

Dunia internasional juga dapat menawarkan aneka paket ekonomi, melalui pemerintah Indonesia. Kesejahteraan rakyat Aceh lebih terjamin, termasuk juga kesejahteraan aktivis dan pimpinan GAM. Jepang dan Jerman pernah dikontrol oleh AS dan kini menjadi negara super power di bidang ekonomi. Acehpun punya peluang yang sama, jika dibantu secara ekonomi.

Pada saat yang sama kalangan garis keras di tubuh tentara dan politisi sipil Indonesia harus pula diatasi. Berbeda dengan kalangan moderat, pimpinan tentara dan politisi sipil Indonesia juga tidak nyaman dengan perundingan damai. Bagi mereka, GAM adalah pemberontak bersenjata yang harus ditumpas. Berdamai dengan pemberontak akan memberikan preseden buruk kepada para pemberontak lain. Akibatnya, GAM akan terus dijadikan referensi jika para pemberontak ingin Indonesia berunding dengan melibatkan dunia internasional.

Hanya jika kelangan moderat memimpin Indonesia serta mendominasi GAM, dan dibantu oleh Henry Dunant Center, hadiah Nobel perdamaian bukan mustahil. Walau tidak dapat mengganti nyawa, air mata dan penderitaan yang sudah tumpah di Aceh, hadiah Nobel di tahun 2005, atau 2004, akan menjadi bab penutup yang cantik bagi konflik panjang di Aceh.

Sumber Naskah

1. Politik 2002 Kesulitan Permanen Megawati, *Koran Tempo*, 2 Januari 2002
2. Para Pembisik Megawati?, *Koran Tempo*, 16 Juli 2002
3. Kontroversi Taufiq Kiemas, *Koran Tempo*, 7 Agustus 2002
4. Ilusi Presidium Nasional? *Koran Tempo*, 14 Januari 2003
5. Wiranto, Eros, Adi dan Fuad, *Koran Tempo*, 28 Januari 2003
6. Kompromi Soal Konstitusi, *Koran Tempo*, 23 April 2002
7. Terganjalnya Politik Reformasi, *Koran Tempo*, 21 Mei 2002
8. Larangan Pejabat Berkampanye, *Koran Tempo*, 18 Juni 2002
9. Selamat Datang Konstitusi Baru, *Koran Tempo*, 13 Agustus 2002
10. Atas Nama Islam, *Koran Tempo*, 13 September 2002
11. Kini Mereka Saling Menembak, *Koran Tempo*, 8 Oktober 2002
12. Upaya Terakhir Melawan Korupsi?, *Koran Tempo*, 3 Desember 2002
13. Setelah Kasus Tempo Versus Tomy, *Koran Tempo*, 18 Maret 2003
14. Golkar Setelah Buloggate II, *Koran Tempo*, 15 Januari 2002
15. Pengadilan Politik Akbar Tandjung?, *Koran Tempo*, 12 Maret 2002
16. Rapuhnya Aliansi Partai, *Koran Tempo*, 4 Juni 2002

17. Tragedi Politik Gus Dur, *Koran Tempo*, 30 Juli 2002
18. Calon Presiden dan Wapres 2004, *Koran Tempo*,
27 Agustus 2002
19. Dilema Partai Golkar?, *Koran Tempo*, 24 September 2002
20. Rekayasa Konflik di Ambon?, *Koran Tempo*, 7 Mei 2002
21. Laskar Jihad, FPI dan Muhajidin, *Koran Tempo*,
22 Oktober 2002
22. Pengadilan Buat Ba'asyir, *Koran Tempo*, 5 November 2002
23. Politik Fantasi Para Teroris, *Koran Tempo*,
19 November 2002
24. Hadiah Nobel untuk Aceh?, *Koran Tempo*,
17 Desember 2002

Demokrasi yang terkonsolidasi mensyaratkan satu hal penting. Semua elit yang berpengaruh mesti sepakat bahwa prinsip demokrasi menjadi the only game in town, satu-satunya aturan main yang dijunjung. Para elit itu boleh berbeda pandangan tentang semua hal, mulai dari kebijakan ekonomi, ideologi sampai kebijakan politik. Namun mereka harus sepakat, bahwa perbedaan itu diselesaikan dengan aturan main demokratis. Mereka tidak lagi mencari aturan main di luar prinsip demokrasi. Justru pada titik inilah problem terbesar dari reformasi kita. Tidak semua elit yang berpengaruh sepakat bahwa demokrasi sebagai the only game in town. Sebagian masih memperjuangkan prinsip politik yang sektarian. Sebagian lagi ingin menghambat proses demokratisasi karena terlalu khawatir dengan perubahan yang radikal dan liberal. Setelah sekian tahun reformasi, yang sangat terasa adalah bangkitnya konservatisme politik.